



Volume: 12 Nomor: 02 Desember 2021

E-ISSN: 2714-7754

P-ISSN: 0852-9124

# Jurnal EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

**Al-Asri Abubakar, Rahmatun Nisa dan Junaidi**

Dampak Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie

**Murtala**

Analisis *fiscal policy* terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi aceh

**Bagio, Romano, Yusya Abubakar dan Keumala Fadhiela ND**

Skala Usaha Dan Pendapatan Usahatani Tebu di Kabupaten Aceh Tengah

**Masdi, Irham Iskandar**

Hubungan Kausalitas Antara Infrastruktur, Investasi dan PDRB Per Kapita di Aceh

**Yuli Rahmawati, Khairil Anwar**

Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh

**Fadhlon Ramadhan, Syukriy Abdullah, Syukur Selamat Karo-karo,  
Riha Dedi Priantana**

Determinan Perubahan Anggaran Belanja Daerah

PEMERINTAH ACEH  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
(BAPPEDA) ACEH 2021



[Bappeda Aceh]  
[E-ISSN: 2714-7754]  
[P-ISSN: 0852-9124]  
[Vol. 12 No.2, Desember 2021]  
[0651-29713] | [0651-21440] | [jurnallitbangbappeda@gmail.com]  
<https://ojsbappeda.acehprov.go.id/ojs2/index.php/a>

---

# Jurnal Ekonomi dan Pembangunan

**Al-Asri Abubakar, Rahmatun Nisa dan Junaidi**

Dampak Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie

**Murtala**

Analisis fiscal policy terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi aceh

**Bagio, Romano, Yusya Abubakar dan Keumala Fadhiela ND**

Skala Usaha Dan Pendapatan Usahatani Tebu di Kabupaten Aceh Tengah

**Masdi, Irham Iskandar**

Hubungan Kausalitas Antara Infrastruktur, Investasi dan PDRB Per Kapita di Aceh

**Yuli Rahmawati, Khairil Anwar**

Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh

**Fadhlon Ramadhan, Syukriy Abdullah, Syukur Selamat Karo-karo, Riha Dedi Priantana**

Determinan Perubahan Anggaran Belanja Daerah

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
(BAPPEDA) ACEH 2021**

## **TIM REDAKSI**

**JURNAL EKONOMI PEMBANGUNAN** terbit dua kali setahun pada bulan Juni dan Desember yang berisi tulisan hasil penelitian dan kajian anallisis kritis di bidang Ekonomi Pembangunan :

Pengarah : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh  
Wakil Pengarah : Ir. Alamsyah, MM  
Mitra Bestari : Prof. Dr. M. Shabri Abdul Majid, M.Ec  
Dr. Wawan Hermansyah, SE, MT  
Dr. Amin Pujiati, SE, M.Si  
Dewan Redaksi : Dr. Anton Widyanto, MA, Ed.S  
Dr. Ir. Derita Yulianto, M.Si  
Dr. Irham Iskandar, SE, M.Si  
Wiratmadinata, SH, MH  
Pimpinan Redaksi : Dr. Ir. Ema Alemina, MP  
Pimpinan Administrasi : Dr. Hasrati, SE, M.Si  
Redaktur Pelaksana : Nanda Yuniza, ST, MT  
Staf Redaksi : Hendri Dermawan, S.Kom  
Firman, SE, M.Si  
Iskandar, SE  
Roslaini Z, SE  
Merry Nurfadli Yusan, S.STP  
Masdi, ST  
Ir. Fikar W. Eda  
Qadriansyah

## **Alamat Redaksi**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh  
Bidang Penelitian dan Pengembangan  
Jl. Tgk. H. M. Daud Beureueh No. 26 Banda Aceh  
Telepon: (0651) 21440, 29713  
<https://ojsbappeda.acehprov.go.id/ojs2/index.php/a>  
Email: [jurnallitbangbappeda@gmail.com](mailto:jurnallitbangbappeda@gmail.com)

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan ridha-Nya sehingga Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Volume 12 Nomor 2 Edisi Desember Tahun 2021 dapat diterbitkan. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menanamkan risalah kepada ilmuwan masa lalu, sekarang, dan yang akan datang.

Penerbitan jurnal ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan dan memajukan ilmu pengetahuan sekaligus memberikan informasi bagi *stakeholder* yang berkaitan dengan Ekonomi dan Pembangunan di berbagai sektor.

Terbitan Volume 12 Nomor Edisi Desember Tahun 2021 ini, tim redaksi telah berupaya meningkatkan kualitasnya dengan melakukan perbaikan-perbaikan dalam hal penambahan dewan pakar, format penulisan yang lebih konsisten, judul jurnal yang lebih mudah dimengerti serta selektif dalam pengambilan artikel yang akan diterbitkan.

Volume ini berisi enam artikel, yang dimuat adalah: 1). Dampak Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie; 2) Analisis Fiscal Policy Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Aceh; 3) Skala Usaha Dan Pendapatan Usahatani Tebu di Kabupaten Aceh Tengah; 4) Hubungan Kausalitas Antara Infrastruktur, Investasi Dan Pdrb Per Kapita Di Aceh; 5) Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Aceh; 6) Determinan Perubahan Anggaran Belanja Daerah.

Akhirnya ucapan terima kasih kepada para penyunting ahli dan *reviewer* yang telah bersedia memberikan masukan demi penyempurnaan jurnal ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para penulis yang telah dimuat tulisannya. Harapan kami semoga tulisan-tulisan ilmiah yang disajikan akan memberikan tambahan pengetahuan kepada semua pembaca. Selain itu, kami juga mengundang semua pihak untuk dapat mengirimkan tulisan ilmiah untuk terbitan selanjutnya. Redaksi juga mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak dalam upaya untuk meningkatkan kualitas jurnal ini.

Redaksi

## DAFTAR ISI

Dampak Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie <b>Al-Asri Abubakar, Rahmatun Nisa dan Junaidi.....</b>	<b>95</b>
Analisis <i>fiscal policy</i> terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi aceh <b>Murtala.....</b>	<b>103</b>
Skala Usaha Dan Pendapatan Usahatani Tebu di Kabupaten Aceh Tengah <b>Bagio, Romano, Yusya Abubakar dan Keumala Fadhiela ND.....</b>	<b>115</b>
Hubungan Kausalitas Antara Infrastruktur, Investasi dan PDRB Per Kapita di Aceh <b>Masdi, Irham Iskandar.....</b>	<b>127</b>
Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh <b>Yuli Rahmawati, Khairil Anwar.....</b>	<b>141</b>
Determinan Perubahan Anggaran Belanja Daerah <b>Fadhlon Ramadhan, Syukriy Abdullah, Syukur Selamat Karo-karo, Riha Dedi Priantana.....</b>	<b>155</b>



**DAMPAK PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)  
DANA DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
PADA MASA PANDEMI COVID-19  
DI KECAMATAN PEUKAN BARO KABUPATEN PIDIE**

***THE IMPACT OF VILLAGE FUNDS DIRECTLY CASH ASSISTANCE  
(BLT) PROGRAM ON COMMUNITY WELFARE DURING THE  
COVID-19 PANDEMIC IN THE DISTRICT OF PEUKAN BARO,  
PIDIE REGENCY***

**Al-Asri Abubakar<sup>1</sup>, Rahmatun Nisa<sup>2</sup>, Junaidi<sup>3</sup>**

<sup>1,2</sup>Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian, Universitas Jabal Ghafur - Aceh  
E-mail: alasri\_abubakar@yahoo.com

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah program bantuan langsung tunai (BLT) kesejahteraan masyarakat pada masa pandemi covid-19 di Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie. Penelitian ini dimulai dari bulan April sampai dengan bulan Juni 2021. Sampel penelitian sebanyak 35 responden dari perwakilan populasi 1591 keluarga penerima manfaat (KPM) yang tersebar di 6 mukim Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan selanjutnya data ditabulasi dan dijelaskan secara deskriptif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dan analisis kuantitatif serta metode regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program bantuan langsung tunai (BLT) dana desa tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,106 lebih besar dari nilai probabilitas 0,05. Tidak berpengaruhnya program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat disebabkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa tidak memberikan perubahan kesejahteraan hidup kepada masyarakat Kecamatan Peukan Baro, karena masyarakat setempat memiliki penghasilan sendiri untuk mencukupi kehidupan sehari-harinya, selain itu jumlah dana yang diberikan tidak begitu besar sehingga Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa tidak begitu memberikan kontribusi pada kebutuhan hidup masyarakat.

Kata kunci: *Bantuan Langsung Tunai, Kesejahteraan, Covid-19*

**ABSTRACT**

*This study aims to determine whether the direct cash assistance (BLT) program for community welfare during the COVID-19 pandemic in Peukan Baro District, Pidie Regency. This research was started from April to June 2021. The research sample consisted of 35 respondents from a population representative of 1591 beneficiary families (KPM) spread over 6 mukims, Peukan Baro District, Pidie Regency. The data*

*was collected using a questionnaire and then the data was tabulated and explained descriptively. The method used in this study uses qualitative analysis methods and quantitative analysis as well as simple linear regression methods. The results showed that the village fund direct cash assistance (BLT) program had no effect on community welfare. This can be seen from the significance value of 0.106 which is greater than the probability value of 0.05. The Village Fund Cash Direct Assistance (BLT) program does not affect the welfare of the community because the Village Fund Direct Cash Assistance (BLT) program does not provide a change in the welfare of the people of Peukan Baro District, because the local community has their own income to meet their daily lives. the amount of funds provided is not so large that the Village Fund Direct Cash Assistance (BLT) does not really contribute to the needs of people's lives.*

*Keywords: Direct Cash Assistance, Welfare, Covid-19*

## **PENDAHULUAN**

Pada awal tahun 2020, covid-19 menjadi masalah kesehatan dunia. Kasus ini diawali dengan informasi dari Badan Kesehatan Dunia/World Health Organization (WHO) pada tanggal 31 Desember 2019 yang menyebutkan adanya kasus kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Kasus ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan terjadi importasi di luar China. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan covid-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit novel coronavirus pada manusia ini dengan sebutan Coronavirus Disease (covid-19). Pada tanggal 2 Maret 2020 Indonesia telah melaporkan 2 kasus konfirmasi covid-19. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan covid-19 sebagai pandemi (Carly Erfly Fernando Maun, 2020).

Pandemi covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan, melainkan

juga pada kondisi sosial dan ekonomi. Dalam jangka pendek, dampaknya pada kesehatan ditunjukkan dengan angka kematian korban di Indonesia yang mencapai 8,9 persen. Pada ekonomi, pandemi ini menyebabkan anjloknya aktivitas perekonomian domestik, yang tidak menutup kemungkinan akan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Dalam jangka menengah, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan hanya pada kisaran 0,4 persen hingga 2,3 persen menurun signifikan jika dibandingkan dengan angka pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai level 5 persen. (Carly Erfly Fernando Maun, 2020)

Wabah memukul banyak sektor usaha, menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja, dan menurunkan penyerapan tenaga kerja. Jika kondisi ini tidak diantisipasi dengan baik, diperkirakan bisa terjadi ketidakstabilan sosial. Dalam jangka panjang, kesenjangan antar kelompok pendapatan akan melebar, disparitas antar wilayah dan kota-desa akan meningkat, serta berdampak pada terjadinya



kemiskinan antar generasi. Pandemi covid-19 menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian desa. Untuk saat ini, dampak covid-19 lebih dirasakan oleh masyarakat di perkotaan. Namun, mengingat pekerja musiman memiliki mobilitas cukup tinggi, dari desa ke kota lalu kembali ke desa, wabah covid-19 juga bisa merebak di desa. (Carly Erfly Fernando Maun, 2020)

Kabupaten Pidie merupakan salah satu kabupaten yang juga terdampak pandemi covid-19, mengingat bahwa proses penyebaran covid-19 dapat terjadi dengan sangat mudah dan cepat. Tingginya mobilitas masyarakat dan kurangnya kepedulian akan protokol kesehatan membuat lonjakan kasus covid-19 di Pidie meningkat pada September dan akhir Januari lalu. Pidie sempat tercatat sebagai zona merah covid-19, dan menerima kebijakan perlakuan pembatasan sosial bersekala besar (PSBB), dan sekolah pun dimintai untuk melakukan kegiatan belajar mengajar dengan metode daring atau via online.

Kecamatan Peukan Baro salah satu kecamatan dengan jumlah desa yang tergolong banyak. Keadaan masyarakat di Kecamatan Peukan Baro sedikit sulit dikarenakan pandemi yang masih saja berlanjut. Banyak masyarakat yang perekonomiannya menurun saat ini. Pendapatan rata-rata masyarakat Peukan Baro umumnya berasal dari sektor pertanian dan sektor perdagangan, sedangkan saat ini sektor perdagangan sedang mengalami masalah seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Tidak heran bila masyarakat di Kecamatan Peukan

Baro mengalami penurunan ekonomi untuk saat ini.

Terbitnya Perpu Nomor 1/2020 memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak pandemi covid-19 terhadap perekonomian desa. Pada Pasal 2 Ayat (1) huruf (i) peraturan tersebut disebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu, penyesuaian alokasi, dan pemotongan/penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa, dengan kriteria tertentu. Selanjutnya dalam penjelasan Perpu tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pengutamakan penggunaan dana desa” adalah dana desa dapat digunakan antara lain untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi covid-19. Dengan adanya pasal tersebut serta dengan penjelasannya, perlu dilakukan kajian bagaimana kebijakan tersebut dapat diterapkan dengan cepat dan menekan jebak moral (Moral Hazard, 2020).

Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin dalam bentuk uang tunai untuk membantu mereka menghadapi kesulitan ekonomi di tengah pandemi covid-19. Program ini merupakan salah satu dari beberapa model skema perlindungan sosial yang berbasis bantuan sosial. Target penerima manfaat adalah rumah tangga, target tersebut relevan ditetapkan mengingat sebagian besar program nasional yang terkait dengan bantuan sosial merujuk pada penerima manfaat di tingkat rumah tangga, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan

Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Sasaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa adalah keluarga miskin yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Keluarga miskin bukan PKH dan BPNT
2. Keluarga miskin bukan penerima kartu prakerja
3. Masyarakat yang kehilangan mata pencaharian akibat covid-19
4. Keluarga miskin yang belum terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
5. Keluarga yang mempunyai anggota keluarga rentan sakit menahun atau kronis.
6. Bukan pegawai negeri sipil (PNS), pegawai badan usaha milik negara (BUMN), dan pensiunan.

Ketentuan dan mekanisme pendataan hingga pelaksanaan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) tercantum dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 yang diterbitkan 14 April 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi (PDPT) Nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020.

Adapun data jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa di Kecamatan Peukan Baro yaitu terdapat 1591 penerima per Keluarga Penerima Manfaat (KPM), data tersebut di dapatkan dari hasil prapenelitian di kantor camat Peukan Baro. Data yang diberikan berupa jumlah penerima bantuan langsung tunai (BLT) dana desa per desa di Kecamatan Peukan Baro, jumlah dana yang di salurkan Bantuan

Langsung Tunai (BLT) pada setiap desa, beberapa keterangan terkait penyaluran, penambahan atau pengurangan target penerima bantuan langsung tunai (BLT) dana desa, waktu penyaluran dan beberapa hal lain. Data tersebut dapat dilihat pada lampiran

Adanya program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mempertahankan tingkat daya beli masyarakat miskin yang terdampak covid-19. Namun apakah bantuan tersebut telah digunakan dengan efisien oleh masyarakat sehingga program ini mampu meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa. (Carly Erfly Fernando Maun, 2020)

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis ingin melakukan penelitian terkait efisiensi penggunaan dan pemanfaatan dana program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan judul "Dampak Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie"

## **METODE**

### **Analisis Data**

Analisis data pada dasarnya yaitu memperkirakan atau dengan menentukan besarnya pengaruh secara kuantitatif dari perubahan suatu (beberapa) kejadian terhadap sesuatu (beberapa) kejadian lainnya, serta memperkirakan atau meramalkan kejadian lainnya. Kejadian

(event) dapat dinyatakan sebagai perubahan nilai variabel (Iqbal, 2016).

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier sederhana melalui bantuan Program SPSS 21.0. karena variabel yang terlibat dalam penelitian ini ada dua, yaitu sebagai variabel bebas dan dilambangkan dengan X, sebagai variabel terikat dan dilambangkan dengan Y. Model Ekonometrik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear sederhana yang di informasikan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta X + e$$

Keterangan:

Y = Kesejahteraan masyarakat pada masa pandemi

X = Dampak program BLT dana desa

$\alpha$  = Konstanta

$\beta$  1 = Koefisien regresi

e = Pengganggu (error)

Skala pengukuran variabel dalam penelitian ini digunakan skala Likert dengan lima rentangan. Skala Likert dapat digunakan untuk mengukur item - item pernyataan yang bersifat positif maupun negatif terhadap masalah yang diteliti. Alternatif penilaian dalam pengukuran untuk item - item yang bersifat positif adalah dari jawaban responden mulai dari jawaban sangat tidak setuju, tidak setuju, kurang setuju dan sangat setuju.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Kecamatan Peukan Baro**

Keadaan masyarakat Kecamatan Peukan Baro saat ada pandemi tentunya berbeda dengan saat sebelum adanya pandemi, umumnya penghasilan masyarakat menurun. Penurunan

pendapatan membuat masyarakat harus sedikit berhemat dan mengurangi pengeluaran bulanan untuk kebutuhan pokok. Namun adanya bantuan yang diberikan pemerintah yaitu berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa. Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak pandemi covid-19. Adapun penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa diberikan setiap bulan dibagi dalam 3 (tiga) tahap. Tahap pertama yaitu dari bulan April hingga Juni dengan nominal yaitu Rp. 600.000. Tahap kedua dihitung dari bulan Juli hingga September dengan jumlah dana yang diberikan yaitu Rp. 300.000. Tahap terakhir yaitu dari bulan Oktober hingga Desember dengan jumlah dana Rp. 300.000.

Jangka waktu dari penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa ini masih belum jelas karena jika pandemi covid-19 ini masih belum usai diperkirakan program ini masih akan berlanjut. Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa ini bebas pajak. Jika kebutuhan desa melebihi ketentuan maksimal yang dapat dialokasikan oleh desa, maka kepala desa dapat mengajukan usulan penambahan alokasi dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa kepada Bupati/Wali Kota. Usulan tersebut harus disertai alasan penambahan alokasi sesuai keputusan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus).

Jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa di Kecamatan Peukan Baro yaitu 1591 KPM (Keluarga Penerima Manfaat). 1591 KPM ini dipilih oleh relawan covid-19

dan juga perangkat desa, serta sasaran dari pada penerima dipilih dengan mengacu pada Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 yang diterbitkan 14 April 2020.

Tim pendata harus memastikan kelompok rentan seperti keluarga miskin yang dikepalai oleh perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas terdata sebagai calon Keluarga Penerima

Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa.

### Uji Determinan

Nilai koefisien determinasi (*R square*) digunakan untuk memprediksi seberapa besar kontribusi pengaruh variable bebas (X) terhadap variable terikat (Y) dengan syarat hasil uji F bernilai signifikan. Nilai determinasi dapat dilihat pada tabel berikut.

### Model Summary

R	R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics	
			R Square Change	Sig. F Change
.278 <sup>a</sup>	.077	2.605	.077	.106

a. Predictors: (Constant), blt dana desa

Sumber: Data Primer, 2021 (Diolah)

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa, nilai *R square* sebesar 0,077 artinya variabel Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa (X) secara bersamaan mempengaruhi variabel dependen sebesar 7,7% dalam kategori rendah, sedangkan sisanya sebesar 92,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk model estimasi ini.

### Uji F/Uji Model

Uji F dalam penelitian ini menggunakan uji ANOVA. Uji ini dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh bersama-sama (*simultan*) variabel bebas Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa (X) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y) sebagai variable terikat. Dasar pengambilan keputusan dapat dilihat sebagai berikut:

### ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	18.695	1	18.695	2.756	.106 <sup>b</sup>
Residual	223.876	33	6.784		
Total	242.571	34			

a. Dependent Variable: kesejahteraan masyarakat

b. Predictors: (Constant), blt dana desa

Berdasarkan hasil uji simultan dari tabel di atas ditunjukkan bahwa nilai

signifikansi 0,106 lebih besar dari 0,05 karena nilai signifikansi lebih besar dari

0,05 maka model regresi tidak dapat digunakan untuk memprediksi tingkat kesejahteraan masyarakat atau dapat dikatakan bahwa variabel bebas Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa (X) secara bersama-sama (simultan) tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat (Y) di Kecamatan Peukan Baro.

### Pengujian Hipotesis

Untuk menganalisis Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie di lakukan dengan menggunakan program SPSS. Adapun hasilnya dapat dilihat pada table berikut:

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	24.662	5.900		4.180	.000
blt dana desa	.293	.177	.278	1.660	.106

a. Dependent Variable: kesejahteraan masyarakat

Persamaan regresi yang didapatkan dari tabel adalah sebagai berikut :

$$Y = 24.662 + 0.293X$$

Hasil persamaan regresi menunjukkan bahwa 24.662 merupakan konstanta. Variabel Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa (X) yang memiliki nilai koefisien regresi yaitu 0.293.

Koefisien variabel Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa (X) tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat (Y) dengan nilai t 1.660 dan nilai koefisien sebesar 0.106 > nilai probabilitas 0,005. Tidak berpengaruhnya program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat disebabkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa tidak memberikan perubahan kesejahteraan hidup kepada masyarakat Kecamatan Peukan Baro, karena masyarakat setempat memiliki penghasilan sendiri

untuk mencukupi kehidupan sehari-harinya, selain itu jumlah dana yang diberikan tidak begitu besar sehingga Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa tidak begitu memberikan kontribusi pada kebutuhan hidup masyarakat.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, koefisien variabel Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa (X) tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat (Y) dengan nilai t 1.660 dan nilai koefisien sebesar 0.106 > nilai probabilitas 0,005. Tidak berpengaruhnya program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat disebabkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa tidak memberikan perubahan kesejahteraan

hidup kepada masyarakat Kecamatan Peukan Baro, karena masyarakat setempat memiliki penghasilan sendiri untuk mencukupi kehidupan sehari-harinya, selain itu jumlah dana yang diberikan tidak begitu besar sehingga Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa tidak begitu memberikan kontribusi pada kebutuhan hidup masyarakat.

Saran yang dapat diberikan antara lain, pertama, masyarakat disarankan agar dapat mengelola dana bantuan langsung tunai dengan baik sesuai dengan tujuan yang dimaksud oleh pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari; kedua, pemerintah daerah dan pemerintah pusat diharapkan melakukan sosialisasi dan pengarahan kepada masyarakat untuk dapat menggunakan dana yang diberikan sesuai dengan tujuan program bantuan langsung tunai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Carly Erfly Fernando Maun. 2020. Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Fisip Unsrat. Kota Manado.
- Iqbal. 2016. Metode Penelitian Administrasi. Alfabeta. Bandung.
- Moral Hazard. 2020. Analisis Kebijakan Publik. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
- <https://aceh-tribunnews>. 23 Maret 2021. 12 : 40 WIB

[https://id.wikipedia.org/wiki/Peukan\\_Bar,\\_Pidie](https://id.wikipedia.org/wiki/Peukan_Bar,_Pidie) 23 Maret 2021. 12 : 47 WIB

<https://kueh.desa.id/first/artikel/2020/9/26/permendes-pdtt-nomor-13-tahun-2020-tentang-prioritas-penggunaan-dana-desa-tahun-2021>. 23 Maret 2021. 20 : 44 WIB

**ANALISIS *FISCAL POLICY* TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI  
DI PROVINSI ACEH**

***FISCAL POLICY ANALYSIS OF ECONOMIC GROWTH  
IN ACEH PROVINCE***

**MURTALA**

Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas  
Malikussaleh

E-mail: murtala@unimal.ac.id

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan fiskal dalam bentuk pajak dan belanja pegawai terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan variabel pajak, belanja pegawai dan pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan model *regresi*. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan fiskal dalam bentuk pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Kebijakan fiskal dalam bentuk belanja pegawai juga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh artinya semakin tinggi angka belanja pegawai maka akan menurunkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Kebijakan fiskal baik pajak maupun belanja pegawai berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Aceh sebesar 81,8 persen dan sisanya sebesar 18,2 persen dipengaruhi oleh variabel lainnya diluar model penelitian ini. Diharapkan kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar dapat membantu dan mendorong kegiatan pertumbuhan ekonomi di provinsi Aceh, dengan tidak sembarangan menaikkan pajak dan belanja pegawai.

Kata Kunci : *Fiscal Policy* dilihat dari Pajak dan Belanja Pegawai dan Pertumbuhan Ekonomi

***ABSTRACT***

*This study aims to determine the effect of fiscal policy in the form of taxes and personnel expenditures on economic growth in Aceh Province. The type of data used is secondary data using the variables of taxes, personnel expenditures and economic growth using a regression model. The results show that fiscal policy in the form of taxes has a negative and significant effect on economic growth in Aceh Province. Fiscal policy in the form of personnel expenditure has a negative and significant effect on economic growth in Aceh Province, meaning that the higher the number of personnel expenditures, the lower economic growth in Aceh Province. Fiscal policies, both taxes and personnel expenditures, affect economic growth in Aceh 81.8 percent and the remaining 18.2 percent is influenced by other variables outside this research model. It is hoped that the local government and the central government can help the province and encourage economic growth activities in Aceh, by not increasing taxes and personnel spending.*

*Keywords: Fiscal Policy in Terms of Taxes and Employee Expenditures and Economic Growth*

## PENDAHULUAN

Kebijakan Fiskal sebuah tindakan yang diambil oleh Pemerintah dalam bidang perpajakan dan anggaran belanja negara dengan tujuan mempengaruhi pengeluaran agregat ekonomi. Kebijakan fiskal dapat berupa kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal ekspansif adalah kebijakan fiskal yang bertujuan meningkatkan *output* perekonomian. Kebijakan fiskal kontraktif bertujuan mengurangi *output* perekonomian. Oleh karena itu, kebijakan fiskal juga merupakan instrumen stabilisasi pemerintah (Chaerani, 2018).

Pertumbuhan ekonomi atau peningkatan *output* perekonomian menurut Solow dipengaruhi oleh tabungan, pertumbuhan populasi, dan kemajuan teknologi. Tabungan merupakan instrumen yang dipengaruhi oleh kebijakan fiskal (penerimaan pajak dan belanja negara mempengaruhi tabungan nasional). Secara tidak langsung kebijakan fiskal ikut mengambil peran dalam pertumbuhan ekonomi. Keputusan-keputusan pemerintah mengenai kebijakan fiskal yang ditempuh suatu negara dapat mengubah *output* dalam perekonomian, baik bertambah maupun berkurang (Chaerani, 2018).

Penurunan pajak (T) maupun peningkatan belanja (G) memiliki *multiplier effect* (efek penggandaan) terhadap pendapatan (*output* perekonomian) suatu negara. Alasannya adalah pendapatan yang lebih tinggi menyebabkan konsumsi yang lebih tinggi. Kenaikan belanja pemerintah menyebabkan meningkatnya pendapatan, kemudian meningkatkan konsumsi, yang

selanjutnya meningkatkan pendapatan, kemudian meningkatkan konsumsi dan seterusnya. Perlambatan pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh sejumlah alasan, diantaranya kinerja pertumbuhan PDB masih dibayangi oleh ketidakpastian kondisi ekonomi global, khususnya di negara-negara maju seperti Jepang dan kawasan Eropa. Selain itu, terdapat fluktuasi perubahan asumsi ekonomi makro yang turut berpengaruh pada perlambatan pertumbuhan ekonomi (Kemenkeu, 2018).

Jadi, peningkatan belanja pemerintah G akan menambah *output* perekonomian suatu negara secara langsung. Namun demikian, peningkatan itu tidak serta-merta akan terus terjadi seiring bertambahnya belanja pemerintah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal itu disebabkan oleh faktor-faktor lain yang memperlambat laju pertumbuhan ekonomi, misalnya perekonomian global yang tidak stabil dan fluktuasi asumsi ekonomi makro (Chaerani, 2018).

Kebijakan fiskal sebagaimana tertuang dalam undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah pusat bertujuan untuk menyelaraskan dengan kebijakan fiskal yang berkesinambungan (*fiscal sustainable*). Kebijakan fiskal dilakukan pemerintah dengan mendesain anggaran negara (APBN) dan mengubah angka-angka agar diperoleh keadaan seperti yang ada pada tujuan penyusunan APBN (World Bank, 1997).

Nopirin (2015) Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi



perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah

Saputra (2012), kebijakan fiskal merupakan proses pemasukan dan pengeluaran dana dari pemerintah. Anita (2014) kebijakan fiskal adalah sebuah mekanisme penyelenggara pemerintahan yang menyangkut pola hubungan antara pemerintah nasional dan pemerintah lokal.

Pengelompokan dari dampak kebijakan fiskal menjadi dua yaitu dampak terhadap sisi permintaan (*demand side effect*) dan dampak terhadap sisi penawaran (*supply side effect*). Dampak kebijakan fiskal terhadap sisi penawaran mempunyai implikasi jangka panjang. Kebijakan fiskal yang berorientasi untuk meningkatkan *supply side* dapat mengatasi masalah keterbatasan kapasitas produksi dan karena itu dampaknya lebih bersifat jangka panjang (Amin, .

Dampak kebijakan fiskal terhadap perekonomian melalui pendekatan permintaan agregat diterangkan melalui pendekatan Keynes. Pendekatan Keynesian mengasumsikan adanya *price rigidity* dan *excess capacity* sehingga output ditentukan oleh permintaan agregat (*demand driven*).

Keynes menyatakan bahwa dalam kondisi resesi, perekonomian yang berbasis mekanisme pasar tidak akan mampu untuk pulih tanpa intervensi dari Pemerintah. Kebijakan moneter tidak berdaya untuk memulihkan perekonomian karena kebijakan hanya bergantung kepada penurunan suku bunga sementara dalam kondisi resesi tingkat suku bunga umumnya sudah rendah dan bahkan dapat mendekati nol.

Dalam pendekatan Keynes, kebijakan fiskal dapat menggerakkan perekonomian karena peningkatan pengeluaran pemerintah atau pemotongan pajak mempunyai *efek multiplier* dengan cara menstimulasi tambahan permintaan untuk barang konsumsi rumah tangga.

Demikian pula halnya apabila pemerintah melakukan pemotongan pajak sebagai stimulus perekonomian. Pemotongan pajak akan meningkatkan *disposable income* dan pada akhirnya mempengaruhi permintaan. Kecenderungan rumah tangga untuk meningkatkan konsumsi dengan meningkatkan *marginal propensity to consume (mpc)*, menjadi rantai perekonomian untuk peningkatan pengeluaran yang lebih banyak dan pada akhirnya terhadap output. *Government spending multiplier* dinyatakan sebagai  $1/(1-mpc)$ , dan dari formula ini terlihat bahwa semakin besar *mpc* maka semakin besar pula dampak dari pengeluaran pemerintah terhadap GDP. Sementara itu *efek multiplier* dari pemotongan pajak (*tax cut multiplier*) dinyatakan sebagai  $(1/(1-mpc) - 1)$ . *Tax cut multiplier* adalah satu dikurangi dengan *government spending multiplier*. *Tax cut multiplier* selalu lebih kecil dari *spending multiplier*, oleh karenanya pemotongan pajak dianggap kurang potensial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam masa resesi dibandingkan dengan peningkatan pengeluaran pemerintah.

Besarnya *efek multiplier* dari peningkatan pengeluaran pemerintah dan pemotongan pajak bergantung kepada besarnya *mpc* yang bergantung kepada apakah peningkatan tersebut bersifat transitory atau permanen. Dalam hal ini,

dampak mpc atas perubahan pendapatan transitori lebih kecil dibandingkan perubahan pendapatan yang permanen. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, April 2012.

Pengembangan model Keynesian memungkinkan adanya tambahan dampak *crowding out* melalui perubahan yang disebabkan oleh suku bunga dan nilai tukar. *Crowding out* terjadi apabila Pemerintah menyediakan barang dan jasa yang menggantikan barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor swasta. Tingkat *crowding out* mempengaruhi besaran *fiskal multiplier*.

Penerimaan pemerintah adalah pemasukan yang digunakan sebagai sumber pendanaan kegiatan dan kebutuhan negara dalam rangka pembangunan negara (Syamsi, 2012). Penerimaan pemerintah atau penerimaan uang negara yakni meliputi pajak, retribusi, keuntungan perusahaan negara, denda, sumbangan masyarakat, dll (Mardiasmo, 2012).

Hubungan antara variabel penerimaan pemerintah meningkat maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi begitu juga sebaliknya (Saputra, 2012). Nopirin (2015), penerimaan pemerintah adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian. Saputra (2012), penerimaan pemerintah dapat berupa pajak, retribusi dll. Anita (2014) penerimaan pemerintah adalah pemasukan dalam kas negara untuk proses kelangsungan negara.

Penerimaan pajak merupakan salah satu penerimaan pemerintah yang cukup besar. Kebijakan pajak sangat diperlukan bagi setiap negara dalam mempertahankan dan memperkuat

kompetensi serta daya saing mereka dalam dunia internasional. Saat ini dengan kondisi modal yang bergerak dengan sangat cepat, maka diperlukan kebijakan pajak yang kompetitif dalam rangka menarik modal dan meningkatkan teknologi dalam memaksimalkan pertumbuhan ekonomi.

Setiap negara memiliki filosofi yang berbeda tentang perpajakan dan metode yang berbeda dalam pengumpulan pajak dari masyarakat. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perbedaan penggunaan dari total belanja pemerintah mempengaruhi pertumbuhan yang berbeda dan hal ini juga dipengaruhi oleh cara penerimaan pajak yang berbeda, Agell, Lindh, and Ohlsson (1997); Atkinson (1995); Castles and Dowrick (1990) dalam Dariatno (2020). Selama dekade terakhir, beberapa negara telah mengalami penerimaan pajak yang meningkat cukup drastis, sementara di lain sisi negara yang lain tetap pada tarif pajak yang hampir sama.

Sementara di sisi lain terdapat pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) yaitu bagian dari kebijakan fiskal (Sukirno, 2012). Pengeluaran Pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal (Subri, 2013), yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya.

Hubungan antara variabel pengeluaran pemerintah memiliki hubungan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, dimana ketika pengeluaran

pemerintah semakin tinggi maka akan menurunkan pertumbuhan ekonomi (Fithri, 2017).

Amalia, (2015) dan Ratih, (2017) pengeluaran pemerintah adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Fithri, 2017) pengeluaran pemerintah adalah anggaran yang dikeluarkan untuk proses pembiayaan-pembiayaan dengan fungsi menstabilkan harga guna mendorong pertumbuhan ekonomi..

Aprilia (2016) dan Sukirno (2012) menyebutkan pertumbuhan ekonomi yaitu perkembangan kegiatan ekonomi yang berlaku dari waktu ke waktu dan menyebabkan pendapatan nasional riil semakin berkembang. Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya yang ditentukan oleh adanya kemajuan (Todaro, 2019).

Provinsi Aceh tahun anggaran 2018 mendapatkan alokasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 14,48 triliun. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2017 yang sebesar Rp 13,23 Triliun. Sedangkan belanja dalam angka transfer ke daerah mengalami penurunan alokasi, dari yang sebesar Rp 36,71 triliun pada tahun anggaran 2017 menjadi Rp 34,70 triliun di tahun anggaran 2018. Pada tahun anggaran 2018, alokasi belanja pemerintah pusat memiliki proporsi 29,44% dari total belanja APBN, dan alokasi belanja transfer ke daerah dan dan desa memiliki proporsi sebesar

70,56%. Sedangkan untuk target penerimaan pajak, Aceh mengalami kenaikan dari tahun anggaran 2017 yang sebesar Rp 5,20 triliun menjadi Rp 5,31 triliun pada tahun anggaran 2018 (Kanwil Dirjen, 2018).

Penerimaan perpajakan masih menjadi sumber utama pendapatan negara yaitu dengan kontribusi sebesar 82,63% pada dari total pendapatan negara 2018. Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2018 yang sebesar Rp 4,26 triliun terdiri dari pajak dalam negeri sebesar Rp 4,25 triliun dan pajak perdagangan internasional sebesar Rp14,07 miliar. Kedua jenis pajak tersebut sama-sama mengalami penurunan realisasi dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 1. Perkembangan Pajak, Belanja Pegawai dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh

Tahun	Pajak (Rp)	Belanja Pegawai (Rp)	PE (%)
2004	138.257.821	467.478.858.706	1,82
2005	177.472.432	642.368.429.121	1,24
2006	309.612.956	361.555.096.915	7,73
2007	307.015.000	614.246.212.326	7,03
2008	464.317.355	640.759.536.546	1,92
2009	462.151.773	532.841.778.439	3,97
2010	521.326.413	248.507.379.228	5,49
2011	586.181.446	252.925.171.167	5,89
2012	687.476.817	303.248.908.388	6,07
2013	687.468.221	484.529.582.149	2,61
2014	1.030.679.175	535.129.368.526	1,55
2015	1.172.685.150	435.005.437.505	0,73
2016	1.252.745.085	421.302.250.740	3,31
2017	1.299.742.665	503.676.245.344	3,58
2018	1.309.081.813	617.004.872.886	5,09

Sumber: Badan Pusat Statistik (2020)

Pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yang sangat drastis sebesar 1,92% dari tahun sebelumnya sementara penerimaan pemerintah dari sektor pajak meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp

464.317.355. Pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 3,97% dengan penerimaan pajak menurun dari tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp 462.151.773. Masalahnya terjadi perbedaan yang tidak sesuai dengan teori yang ada Sasana, (2015). Pemungutan pajak yang berlebihan akan berdampak terhadap menurunnya pertumbuhan ekonomi, hal ini dikarenakan pungutan pajak yang lebih besar akan berdampak terhadap turunnya konsumsi dan investasi masyarakat sehingga aktivitas ekonomi akan menurun, menurunnya aktifitas ekonomi akan berdampak terhadap turunnya pertumbuhan ekonomi.

Kemudian permasalahan yang terjadi pada variabel pengeluaran pemerintah di sektor belanja pegawai, pada tahun 2009 belanja pegawai mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp 532.841.778.439 sedangkan pertumbuhan ekonomi meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 3,97%. Pada tahun 2011 angka belanja pegawai meningkat dari tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp 252.925.171.167 sedangkan pertumbuhan ekonomi juga meningkat menjadi 5,89% dari tahun sebelumnya. Hal ini juga terjadi pada tahun 2012, 2017 dan 2018, kondisi ini susah di prediksi, artinya meningkat atau menurunnya belanja pegawai tidak selalu menurunkan atau meniadakan pertumbuhan ekonomi, artinya bisa terjadi dua kemungkinan pertumbuhan ekonomi bisa meningkat atau menurun ketika belanja pegawai menurun atau ketika belanja pegawai meningkat. Namun secara teori belanja apabila

belanja pegawai meningkat maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sasana, (2015) berbeda yaitu belanja pegawai berpengaruh signifikan namun negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, artinya semakin besar belanja pegawai maka pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *Fiscal Policy* dalam bentuk pajak dan belanja pegawai terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.

## METODE

### Sumber Data

Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui publikasi data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh selama 15 tahun dari tahun 2004-2018.

### Metode Analisis data

Untuk menjawab permasalahan yang diteliti digunakan metode Regresi Linier Berganda dengan persamaannya sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e_i$$

Dimana :

Y = Pertumbuhan ekonomi

$\beta_0$  = Konstanta

$\beta_1$  = Koefisien regresi

$X_1$  = Pajak

$X_2$  = Belanja Pegawai

$e_i$  = Error Term

### Definisi Operasional Variabel

a. Penerimaan Pemerintah yaitu penerimaan pemerintah merupakan

dana yang diperoleh untuk proses pembangunan yang diukur dalam Rupiah.

- b. Pengeluaran Pemerintah yaitu suatu kegiatan pemerintahan sehari-hari untuk proses meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang diukur dalam Rupiah.
- c. Pertumbuhan Ekonomi yaitu proses kenaikan output perkapita produksi dengan Produk Domestic Regional Bruto (PDRB) perkapita yang diukur dalam persentase

### Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah data yang diperoleh terdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan metode Jarque-Bera (J-B). Jika nilai *probability* dari statistik J-B lebih besar dari taraf kepercayaan 5% (0,05) berarti bahwa residu data berdistribusi normal begitupun sebaliknya (Widarjono, 2013).

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah adanya hubungan linier yang signifikan antara beberapa atau semua variabel independent dalam model regresi. Untuk melihat ada tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari koefisien korelasi dari masing-masing variabel bebas. Jika koefisien korelasi antara masing-masing variabel bebas lebih besar dari 0.8 berarti terjadi multikolinieritas begitu juga sebaliknya.

### Uji Autokorelasi

Tes autokorelasi ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi apakah ada korelasi antar keadaan variabel gangguan (*disturbance*) pada periode tertentu dengan variabel gangguan (*disturbance*) pada periode lain. (Subri, 2013). Pendeteksian terhadap penyimpangan asumsi klasik untuk autokorelasi dapat dilihat pada besarnya nilai *Breusch-Godfrey Test*. Jika nilai *Obs. R-Squared* tidak signifikan maka data tidak terjadi autokorelasi.

### Pengujian Hipotesis

#### Uji t

Uji t dilakukan untuk melihat apakah ada hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat secara parsial (Subri, 2013). Adapun kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut:

1. Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  Ho ditolak dan menerima Ha yang artinya variabel bebas (X) secara parsial mempengaruhi variabel terikat (Y).
2. Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka Ho diterima dan menolak Ha yang artinya variabel bebas (X) secara parsial tidak mempengaruhi variabel terikat (Y).

#### Uji F

Uji F dilakukan untuk pengaruh secara simultan variabel bebas terhadap variabel terikat. Apabila uji F hitung lebih besar dari nilai F tabel maka variabel independen secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel dependen (Gujarati, 2014). Adapun kriteria pengujian yang digunakan sebagai berikut:

1. Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan menerima  $H_a$  yang artinya variabel bebas (X) secara simultan atau serentak berpengaruh signifikan variabel terikat (Y)
2. Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan menolak  $H_a$  yang artinya variabel bebas (X) secara simultan atau serentak tidak berpengaruh signifikan variabel terikat (Y)

### Koefisien Korelasi (R)

Sugiyono, (2015) Koefisien korelasi (R) adalah sebuah angka yang dapat dijadikan petunjuk untuk mengetahui berapa besar kekuatan korelasi di antara variabel yang sedang diselidiki korelasinya.

Pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien sebagai berikut (Sugiyono, 2013):

- $>0,00 - 0,199$  = sangat rendah
- $>0,20 - 0,399$  = rendah
- $>0,40 - 0,599$  = sedang
- $>0,60 - 0,799$  = kuat
- $>0,80 - 0,99$  = sangat kuat
- $>1$  = korelasi sempurna

### Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah satu ukuran yang digunakan untuk mengukur pengaruh variabel independen terhadap variansi dependen, dengan  $0 < R^2 < 1$ . Koefisien determinasi pada regresi linier sering diartikan sebagai seberapa besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan variansi dari variabel terikatnya (Subri, 2013).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Asumsi Klasik

#### Hasil Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas untuk melihat apakah data diperoleh ada saling berhubungan antar variabel bebas, dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Uji Multikolinieritas

	Log (Pajak)	Log (Belanja Pegawai)
Log (Pajak)	1	-0,087
Log (Belanja Pegawai)	-0,087	1

Sumber: Hasil Penelitian, 2020 (data diolah)

Dari Tabel 2 disimpulkan nilai *correlation matrix* antar variabel bebas tidak melebihi 0,8, maka dapat dikatakan pada penelitian ini tidak terjadinya multikolinieritas pada ketiga variabel bebas ini. model ini tidak ada multikolonieritas karena antar variabel independen tidak saling berhubungan.

#### Hasil Uji Autokorelasi

Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Uji Autokorelasi

F-statistic	1.368409	Prob. F(2,10)	0.2983
Obs*R-squared	3.223119	Prob. Chi-Square(2)	0.1996

Sumber: Hasil Penelitian, 2020 (data diolah)

Dilihat dari  $obs * R\text{-Squared} < \chi^2$  (*Chi-Square*) tabel pada  $df(2) = 5,99$ , sehingga  $1,36 < 5,99$ . Hal ini juga bisa dilihat dari nilai *probability* (P-value) sebesar  $0,29 > 0,05$ .

### Analisis Pengaruh *Fiscal Policy* Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

Hasil estimasi model penelitian diperoleh hasil perhitungan analisis regresi yaitu:

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.1882	0.07407	1.8572	0.0880
Pajak	-0.6756	1.84970	-5.3652	0.0013
Belanja Pegawai	-0.5004	3.61135	-5.8071	0.0059
R-squared	0.818	F-statistic	11.654	
R-Corellation	0.669	Prob(F-statistic)	0.00	
		Durbin-Watson stat	1.8772	

Sumber: Hasil Penelitian, 2020 (data diolah)

Nilai koefisien korelasi sebesar 66,9 menunjukkan hubungan antara variabel kebijakan fiskal baik pajak dan belanja pegawai terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 66,9 persen. Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,818 artinya kebijakan fiskal baik pajak dan belanja pegawai berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Aceh sebesar 81,8 persen dan sisanya sebesar 18,2 persen dipengaruhi oleh variabel lainnya diluar model penelitian ini.

Nilai konstanta sebesar 1.188 artinya jika variabel pajak dan belanja pegawai bernilai konstant maka pertumbuhan ekonomi sebesar 1,188 persen.

Nilai koefisien regresi pajak sebesar -0,6756 artinya jika pajak meningkat sebesar 1 persen maka akan menurunkan 1 pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh sebesar 0,67 persen.

Nilai koefisien belanja pegawai sebesar -0,5004 artinya jika belanja pegawai meningkat sebesar 1 persen maka akan menurunkan pertumbuhan

ekonomi di Provinsi Aceh sebesar 0,5004 persen.

## Pengujian Hipotesis

### Uji t

Nilai t-hitung penerimaan pemerintah (pajak) adalah sebesar -5,3652 dengan nilai signifikannya adalah 0,0013, sementara nilai t-tabel sebesar 1,78. Artinya secara parsial kebijakan fiskal dalam bentuk pajak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.

Nilai t-hitung dari kebijakan fiskal dalam bentuk belanja pegawai adalah sebesar -5,8071 dengan nilai signifikannya adalah 0,0059, nilai t-tabel sebesar 1,78, artinya secara parsial kebijakan fiskal dalam bentuk belanja pegawai berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.

### Uji F

Nilai F-hitung sebesar 11,654 dengan nilai signifikan sebesar 0,00 artinya kebijakan fiskal baik dalam bentuk pajak dan belanja pegawai secara bersama-sama berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Aceh.

## KESIMPULAN

Kebijakan fiskal baik dalam bentuk pajak maupun dalam bentuk belanja pegawai ternyata berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Artinya kebijakan fiskal yang ekspansif baik dalam bentuk pajak maupun dalam bentuk belanja pegawai

berpengaruh terhadap menurunnya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.

Kebijakan fiskal baik pajak maupun belanja pegawai berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Aceh sebesar 81,8 persen dan sisanya sebesar 18,2 persen dipengaruhi oleh variabel lainnya diluar model penelitian ini.

Diharapkan kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar dapat membantu dan mendorong kegiatan pertumbuhan ekonomi di provinsi Aceh, dengan tidak sembarangan menaikkan pajak namun dari sisi belanja pegawai harus di tingkatkan supaya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Perlu adanya penelitian lanjutan, sehingga diperoleh temuan yang lebih bervariasi dan lebih baik dalam menjelaskan variabel-variabel kebijakan fiskal dengan metode penelitian yang berbeda.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amalia. (2015). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat. *Jurnal Analisis, Vol 4 No.2*.
- Aswandi, Hairul, & Kuncoro, M. (2002). Evaluasi Penetapan Kawasan Andalan: Studi Empiris di Kalimantan Selatan 1993-1999. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia, vol 11, 75-89*.
- Bapennas. (2004). *Statistik Perhubungan*. Buku KeII Perpustakaan Bapenas.
- Dama. (2016). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Manado (Tahun 2005-2014). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi,*

*Vol 16 No.*

- Dariatno. E. S. (2020). Analisis pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia: pendekatan vektor autoregressive. *Forum Ekonomi, 22 (2) 2020, 202-209*.
- Ellah. (n.d.). Analisis Pertumbuhan Sektor Utama terhadap Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Satuan Wilayah Pembangunan Madiun dan Sekitarnya 2003-2013. *Jurnal Ilmiah*.
- Fithri, N. dan D. K. (2017). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 15 No*.
- Chaerani.E.Y.(2018).<https://www.kemenukeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/kebijakan-fiskal-kaitannya-dengan-pertumbuhan-ekonomi-indonesia/>
- Gujarati. D. (2014). *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Erlangga.
- Indra Van, W. (2013). *Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2010*.
- Laporan Perekonomian Indonesia LPI 2016. (n.d.). *Bank Indonesia*.
- Mahsunah. (2013). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Nasional di Indonesia Tahun 2005-2009. *Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 8 No*.
- Permana. (2012). Analisis Pengaruh Pdrb, Pengangguran, Pendidikan, Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Jawa Tengah Tahun 2004-2009. *Dipenogoro Journal If Economics, Vol 1 No*.



- Ratih, G. A. (2017). Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto dan Tingkat Kemiskinan pada Wilayah Sarbagita di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayan, Vol 6 No.*
- Sitaniapessy. (2013). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDRB dan PAD. *Jurnal Economica, Vol 9 No.*
- Subri. (2013). *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. (P. R. G. Persada, Ed.). Jakarta.
- Sugiyono. (2015). *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, S. (2003). *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, S. (2004). *Pengantar Teori Makro*. Jakarta: PT. Graha Grafindo.
- Suryawati. (2005). Memahami Kemiskinan Multidimensional. *Jurnal Pelayanan Kesehatan, Vol. 8 No.*
- Widarjono, A. (2013). *Ekonometrika*. Yogyakarta: Edisi Keempat.



# SKALA USAHA DAN PENDAPATAN USAHATANI TEBU DI KABUPATEN ACEH TENGAH

## *SCALE OF BUSINESS AND INCOME OF SUGAR CANE FACTORY IN CENTRAL ACEH DISTRICT*

**Bagio<sup>1</sup>, Romano<sup>2</sup>, Yusya Abubakar<sup>3</sup>, Keumala Fadhiela ND<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian, Universitas Teuku Umar – Aceh

<sup>2</sup> Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala – Aceh

<sup>3</sup> Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian. Universitas Syiah Kuala – Aceh

E-mail: [bagio@utu.ac.id](mailto:bagio@utu.ac.id)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat besarnya pendapatan yang diperoleh petani tebu; mengetahui luas lahan yang harus dimiliki petani tebu di Kabupaten Aceh Tengah. Penelitian ini dimulai dari bulan April sampai dengan bulan Juni 2020. Sampel penelitian sebanyak 58 responden dari perwakilan populasi 586 yang berasal dari Kecamatan Ketol dan Kecamatan Kute Panang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Data yang dikumpulkan berupakan data primer dan data sekunder, analisis data menggunakan analisis pendapatan. Hasil penelitian bahwa pendapatan bersih yang diperoleh petani bila didistribusikan perbulan maka petani tebu akan memperoleh sebesar Rp. 2.202.636, sedangkan Berdasarkan analisis BEP, rata-rata petani sudah memperoleh keuntungan, bila dilihat dari jumlah produksi petani rata-rata memperoleh hasil Gula merah tebu sebesar 13.198 kg /tahun, begitu pula bila dilihat dari harga jual rata-rata harga jual Rp. 4.847 /kg. Selanjutnya untuk luas lahan, titik impas lahan garapan hanya 0,56 ha, sedangkan konsidi di Kabupaten Aceh Tengah rata-rata petani tebu memiliki lahan 1,20 ha. Maka dari itu, perlu adanya penggunaan bibit unggul, gula yang dihasilkan harus berstandar SNI serta pembenahan jalan usahatani.

Kata kunci: *Tebu, Usahatani, Pendapatan, BEP Luas Lahan.*

### ABSTRACT

*This study aims to see the amount of income earned by sugarcane farmers; knowing the area of land that sugarcane farmers must own in Central Aceh Regency. This research started from April to June 2020. The research sample consisted of 58 respondents from a population of 586 who came from Ketol District and Kute Panang District. The method used in this research is a survey method. The data collected in the form of primary data and secondary data, data analysis using income analysis. The results of the study that the net income obtained when distributed per month then sugarcane farmers will get Rp. 2,202,636 while, Based on BEP analysis, the average farmer has benefited, when viewed from the amount of production the average yield of brown sugar is 13.198 kg / year, as well as when viewed from the average selling price of Rp. 4.847/kg. Furthermore, for the area of land, the break-even point of arable land is only 0.56 ha, while conditions in Aceh Tengah Regency on average have 1.20 ha of land. Therefore, it is necessary to use superior seeds, the sugar produced must be of SNI standard and improve farming roads.*

*Keywords: Sugarcane, Farming, Income, BEP Land Area.*

## PENDAHULUAN

Tebu (*Saccharum Officinarum* L) merupakan salah satu komoditas unggulan nasional dan terus dikembangkan produktivitasnya setiap tahun, cerah prospek tebu juga didukung oleh tidak adanya bahan pengganti (substitusi), bahan pemanis baik yang sintetis maupun yang alami. Bahan pengganti tersebut berupa komoditi lain yang sifat dan fungsinya sama dengan tebu, dengan demikian keberadaan tebu tentunya akan tetap dibutuhkan.

Tebu adalah tanaman yang ditanam untuk bahan baku pembuatan gula dan vetsin. Tanaman ini hanya dapat tumbuh di daerah beriklim tropis. Tanaman ini termasuk jenis rumput-rumputan. Umur tanaman sejak ditanam sampai bisa dipanen mencapai kurang lebih 1 tahun (<http://id.wikipedia.org/wiki/Tebu>, 2011). Pada saat ini tanaman tebu telah dimanfaatkan secara optimal menjadi produk-produk yang memiliki nilai tambah yang tinggi. Di Indonesia, pemanfaatan tertinggi bagian tanaman tebu adalah pada bagian batangnya, karena batang tebu mengandung nira yang memiliki kadar gula yang tinggi untuk selanjutnya diproses menjadi beberapa jenis gula diantaranya gula kristal, gula merah dan gula semut (Lhestari, 2006).

Ketua Asosiasi Gula Indonesia (AGI) Safrida (2020), telah memprediksi produksi gula di tahun 2020 hanya mencapai 2,0 hingga 2,1 juta ton. Hasil panen tersebut turun 10 persen di bandingkan hasil produksi gula Indonesia tahun 2019 mencapai sekitar 2,227 juta ton. Menurut Safrida (2020),

turunnya produksi gula terjadi akibat musim kemarau panjang yang terjadi di tahun 2019. Asmarantaka (2011), menyatakan bahwa peningkatan permintaan yang tidak dibarengi oleh peningkatan produksi di masa yang akan datang akan mengancam industri gula nasional karena dengan masuknya impor akan mengalahkan gula lokal.

Usahatani tebu di Kabupaten Aceh Tengah telah dapat menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat gayo, memberikan penghidupan sebagian besar penduduk yang bekerja pada sektor perkebunan tebu. Hanani (2003) mengemukakan bahwa pada masa mendatang peran agroindustri sangat diharapkan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menciptakan lapangan pekerjaan serta sekaligus sebagai penggerak industrialisasi pedesaan. Dampak positif dari agroindustri yang tumbuh dan berkembang di daerah pedesaan adalah terbukanya jalur transportasi antara satu desa ke desa yang lain atau dengan kota sehingga dapat memberikan kesempatan bagi penduduk desa dalam memperoleh pendapatan yang lebih baik. Kondisi yang sama terjadi pula pada industri gula merah di Kabupaten Aceh Tengah.

Petani tebu mempunyai peranan yang penting di Kabupaten Aceh Tengah, mulai dari pembersihan lahan untuk penanaman tebu hingga pasca panen menjadi gula merah tebu tidak terlepas aktivitas petani. Selain itu, tebu dapat meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Aceh Tengah. Tebu yang ada dijadikan bahan baku untuk pembuatan gula merah, yang memberikan nilai tambah dari tebu tersebut serta terciptanya perdagangan antar daerah.

Gula merah banyak digunakan untuk konsumsi rumah tangga sebagai pemanis, penambah aroma dan warna. Salah satu sifat yang membedakan gula merah dan gula pasir adalah gula merah dapat menimbulkan tekstur makanan yang lebih empuk. Gula merah juga digunakan sebagai bahan baku pada industri kecil baik makanan maupun minuman seperti industri kecap dan tauco yang menggunakan gula merah sebagai pemanis (Soekarto dkk, 2010).

Produksi gula merah tebu di Kabupaten Aceh Tengah berpotensi untuk dikembangkan dengan melihat ketersediaan lahan, iklim yang sesuai dan juga teknik budidaya tebu yang telah dikenal dengan baik oleh masyarakat. Pada tahun 2019, di Kabupaten Aceh Tengah terdapat areal pertanaman tebu seluas 4.047 hektar dengan produksi 32.312 ton gula merah tebu. Potensi lahan yang dapat dikembangkan untuk tanaman tebu mencapai 1.185 hektar (Aceh Tengah Dalam Angka, 2020). Potensi produksi tebu pada lahan yang baik (tersedia air) sekitar 140 ton per hektar. Apabila produktivitas tebu adalah 90 ton/ha pada luas lahan 7.939 ha, maka produksi gula merah tebu yang dapat dicapai sekitar 536 ribu ton per tahun. Produksi tersebut masih kategori rendah, mengingat rendemen gula merah tebu yang digunakan hanya 7,5 persen (Darma, 2011).

Usahatani tebu dipilih sebagai komoditas utama yang dibudidayakan di lahan yang dimiliki petani yang ada di Kecamatan Ketol dan Kute Panang, hingga sekarang masyarakat masih bergantung dari tebu tersebut. Dengan kondisi sekarang, apakah usahatani tebu masih memberikan pendapatan yang

layak bagi petani dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga, dengan beberapa keterbatasan seperti meningkatnya kebutuhan hidup, berkurangnya lahan untuk usahatani tebu karena alih fungsi lahan menjadi perumahan serta fluktuasi harga sarana produksi yang tidak stabil.

Tujuan penelitian adalah pertama, melihat besarnya pendapatan yang diperoleh petani tebu; kedua, mengetahui luas lahan yang harus dimiliki petani tebu.

## **METODE**

### **Analisis Data**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Tengah. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Aceh Tengah merupakan daerah yang mempunyai luas berikan kontribusi besar terhadap total produksi gula merah tebu Provinsi Aceh.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Teknik pengambilan sampling untuk petani menggunakan teknik Acak Berkelompok dua Tahap (*Two Stage Cluster Sampling*), yaitu Tahap I; penentuan kecamatan berdasarkan sentra produksi dan Tahap II; penentuan desa sampel berdasarkan luas lahan budidaya tebu. Teknik purposive sampling digunakan untuk penentuan petani sampel yaitu sebanyak 10 persen, sesuai dengan pendapat Arikunto (2002) yaitu apabila jumlah subjeknya kurang dari 100 orang lebih baik diambil semua, selanjutnya jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25% dari populasi dan dianggap representatif. Besarnya sampel yang

diambil sebesar 10 persen dari seluruh populasi sebanyak 586 orang, sehingga didapat sampel 58 petani yang mengusahakan usahatani tebu.

Metode Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah (Dumairy, 2004).

a) Penerimaan (TR)

Hasil penjualan total yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$TR_n = P_n \times Q_n \dots (1)$$

Dimana:

$TR_n$  = Total Revenue/Hasil Penjualan Tebu (gula merah) (Rp/Tahun)

$P_n$  = Tingkat Harga Tebu (gula merah) (Rp/Kg)

$Q_n$  = Jumlah Penjualan Tebu (gula merah) (Kg/Tahun)

b) Pendapatan

Pendapatan adalah penerimaan bersih yang diterima oleh produsen setelah total hasil penjualan dikurangi dengan total biaya produksi, dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\Pi_n = TR_n - TC_n \dots (2)$$

Dimana:

$\Pi_n$  = Pendapatan Tebu (gula merah) (Rp/Tahun)

$TR_n$  = Total Revenue (penerimaan) Tebu (gula merah) (Rp/Tahun)

$TC_n$  = Total Cost (Biaya) Tebu (gula merah) (Rp/Tahun)

c) Break Even Point (BEP)

*Break Event Point* merupakan perbandingan antara nilai hasil penjualan produksi dengan biaya operasional yang dikeluarkan. Nilai

yang diperoleh merupakan titik impas sebuah usaha dan menggambarkan kondisi sebuah usaha tidak mengalami keuntungan maupun kerugian. Dengan rumus sebagai berikut:

1. *BEP Berdasarkan Jumlah Produksi*

Menggambarkan produksi minimal yang harus dihasilkan dalam proses produksi Tebu (gula merah) supaya tidak mengalami kerugian

$$BEP_{Jumlah\ Produksi} = \frac{Total\ Biaya}{Harga\ Jual} \dots (3)$$

2. *BEP Berdasarkan Harga Jual (Rp)*

Menggambarkan harga terendah dari jumlah produksi yang dihasilkan. Jika harga yang ditawarkan lebih rendah dari harga BEP, maka suatu usaha akan mengalami kerugian, begitu pula sebaliknya.

$$BEP_{Harga\ Jual} = \frac{Total\ Biaya}{Jumlah\ Produksi} \dots (4)$$

Rata-rata luas lahan garapan (*farm size*) pada usahatani tebu yang menguntungkan secara ekonomi dapat diuji dengan menggunakan pendekatan Break Even Point (BEP), yaitu :

$$Titik\ Impas\ Luas\ Lahan = \frac{BEP\ Volum\ Produksi}{Produktivitas} \dots (5)$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Karakteristik Responden

Sumberdaya yang dimiliki individu akan mempengaruhi produktivitas kerja, berfikir dan bertindak serta pengambilan keputusan. Sukses tidaknya suatu usaha sangat tergantung dari kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, kualitas sumber daya manusia akan berdampak pada kemampuan daya dan upaya untuk bekerja. Karakteristik petani merupakan kualitas dari individu petani atau ciri-ciri yang khas dari populasi petani yang diteliti, pada penelitian ini karakteristik yang dilihat adalah umur, pendidikan, pengalaman, jumlah tanggungan dan luas lahan yang dimiliki oleh petani responden.

Tabel 1. Karakteristik Petani Tebu di Daerah Penelitian, Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah	Persentase
1	Umur Petani		
	a. < 15 Tahun	0	-
	b. 15-54 Tahun	53	94,64
	c. > 54 Tahun	3	5,36
	Total	56	100,00
2	Pendidikan		
	a. SD	1	1,79
	b. SMP/SLTP	33	58,93
	c. SMA/SLTA	21	37,50
	d. S1	1	1,79
	Total	56	100,00
3	Pengalaman		
	a. < 10 Tahun	7	12,50
	b. 10 -20 Tahun	29	51,79
	c. > 20 Tahun	20	35,71
	Total	56	100,00
4	Jumlah Tanggungan		
	a. 0-2 Orang	13	23,21
	b. 3-5 Orang	40	71,43

No	Uraian	Jumlah	Persentase
	c. > 5 Orang	3	5,36
	Total	56	100,00

Sumber : Data Primer (diolah), 2020

Berdasarkan Tabel 1, usia petani tebu di Kabupaten Aceh Tengah masih tergolong produktif dengan jumlah responden sebanyak 53 orang dari 56 responden, hal ini berarti petani masih sanggup untuk mengelola usahatani dengan baik. Secara umum petani telah menamatkan pendidikan sekolah dasar (SD), artinya petani sudah melek huruf dan mampu untuk membaca guna meningkatkan usaha budidaya tebu tersebut. Selain itu, petani juga sudah melek teknologi, dilihat dari kepemilikan telpon seluler. Dengan pengalaman petani akan lebih mampu melihat peluang dan menekan resiko dalam berusahatani tebu, dengan rata-rata pengalaman diatas 10 tahun. Semakin berpengalaman responden terhadap satu bidang usaha maka akan semakin mudah mengantisipasi berbagai kendala yang dihadapi dalam usahanya, selain itu kemampuan mengambil keputusan terbaik pada saat yang paling tepat. Jumlah tanggungan petani rata-rata 3-5 orang, dengan adanya anggota keluarga petani sangat terbantu dalam berusahatani tebu. Tuntutan akan hidup apabila jumlah tanggungan besar maka akan semakin besar kebutuhan jika ditinjau dari segi konsumsi dalam keluarga, namun demikian hal ini merupakan asset yang penting dalam menambah pencurahan tenaga kerja.

Tabel 2. Luas Lahan Tebu di Daerah Penelitian, Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah	Persentase
1	0 - 0,5 Hektar	0	-
2	0,5 - 1 Hektar	45	80,36
3	> 1 Hektar	11	19,64
	<i>Total</i>	56	100,00

Sumber : Data Primer (diolah), 2020

Luas lahan merupakan faktor penting dalam berusaha tani, semakin luas lahan yang dimiliki maka hasil yang diperoleh juga meningkat, dengan memperhatikan faktor-faktor lain. Rata-rata luas lahan yang dimiliki petani tebu adalah 0,5 – 1 ha, kepemilikan luas lahan ini sudah dikatakan lahan sedang. Artinya dengan rata-rata 1 ha, sudah dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarga petani. Sejalan dengan yang dikatakan Hernanto (1993), menyebutkan luas lahan terbagi dalam 3 golongan yaitu a) lahan luas, apabila luasnya >2 Ha, b) Lahan sedang, apabila luasnya 0,5-2 Ha dan c) lahan sempit, apabila luasnya <0.5 Ha.

### Sarana Produksi, Tenaga Kerja, Penyusutan Peralatan

Penggunaan sarana produksi yang paling besar adalah lahan untuk budidaya tebu. Karena saat ini untuk membuka lahan baru (hutan) sudah tidak boleh lagi (dilarang) serta alih fungsi lahan untuk perumahan juga meningkat, sehingga untuk memperoleh lahan untuk budidaya tebu sudah sedikit sulit. Namun demikian untuk menggunakan bibit petani mengambil dari lokal (memanfaatkan pucuk tebu yang sudah ditebang), sehingga akan dapat menghemat biaya. Untuk lebih jelasnya penggunaan sarana produksi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Penggunaan Sarana Produksi Usahatani Tebu Tahun 2020

No	Uraian	Rata-rata (Rp)	Rata-rata per Ha (Rp)
1	Sewa Lahan	9.571.429	8.000.000
2	Bibit	1.794.643	1.500.000
3	Urea	1.375.478	1.149.654
4	SP-36	999.245	835.190
5	KCL	1.059.653	885.680
	<i>Total</i>	14.800.448	12.370.524

Sumber : Data Primer (diolah), 2020

Aktivitas petani dimulai dari pembersihan lahan untuk penanaman tebu. Apabila penanaman dilakukan untuk pertama kalinya, maka setelah dilakukan pembersihan, petani membuat lubang tanam dengan ukuran 20 x 20 cm, dengan jarak tanam antar baris 10 cm dan jarak antar lajur 100 m. Sedangkan setelah panen tahun pertama tidak dilakukan lagi penanaman bibit baru petani memelihara rootan tanaman. Setelah panen, sisa-sisa daun tebu dikumpulkan, lalu dibakar tunggu hingga tumbuh tunas baru pada rumpun tebu tersebut, apabila sudah tumbuh tunas, rumpun tebu tadi dikorek dan dibersihkan, bila turun hujan langsung di pupuk. Setelah itu tunggu hingga umur 6 – 7 bulan lalu dilakukan proses ngelentek, selanjutnya tebu dapat dipanen pada umur 10 – 12 bulan. Jenis tebu yang banyak dibudidayakan petani di Kabupten Aceh Tengah adalah tebu jenis surabaya dengan warna coklat besar, ada juga jenis tebu lokal dan tebu PGM atau tebu tri (ukurannya kecil-kecil dan keras) petani kurang untuk membudidayakan.

Penggunaan tenaga kerja mulai dari pra panen hingga pasca panen, yang



paling besar adalah pada saat panen. Sebab pada panen ini membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak serta masih menggunakan tenaga kerja manusia dengan rata-rata harga Rp. 200.000 per truk atau sekitar 4.500 – 5.000 kg tebu yang kemudian tebu yang sudah ditebang diangkut menggunakan truk untuk dibawa ke tempat pembuatan gula merah tebu.

Tabel 4. Rata-rata Biaya Tenaga Kerja Pada Usahatani Tebu di Daerah Penelitian, Tahun 2020

No	Uraian	Rata-rata (Rp)	Rata-rata per Ha (Rp)
1	<i>Pra Panen</i>		
	a. Pembersihan lahan	162.500	135.821
	b. Korek	2.062.500	1.723.881
	c. Pemupukan	167.500	140.000
	d. Ngelentek	1.647.500	1.377.015
2	<i>Pasca Panen</i>		
	a. Panen	6.706.464	5.605.403
	b. Angkut	5.029.848	4.204.052
	c. Masak	5.633.430	4.708.539
Total		21.409.743	17.894.710

Sumber : Data Primer (diolah), 2020

Peralatan yang digunakan petani tebu masih dikatakan sederhana, dan masih bergantung oleh penggunaan tenaga kerja manusia. Rata-rata umur ekonomis dari peralatan yang digunakan adalah 2 (dua) tahun. Dengan umur ekonomis paling pendek adalah parang, karena parang selalu digunakan untuk setiap tahapan pada usahatani tebu hingga pada saat panen, yang digunakan untuk memotong batang tebu.

Tabel 5. Rata-rata Biaya Penyusutan Peralatan Pada Usahatani Tebu di Daerah Penelitian, Tahun 2020

No	Uraian	Rata-rata (Rp)	Rata-rata Per Ha (Rp)
1	Cangkul	67.098	56.082
2	Parang	165.536	138.358
3	Garuk	45.000	37.612

Sumber : Data Primer (diolah), 2020

## Pengujian Hipotesis

### Hipotesis I.

Analisis pendapatan dimaksudkan untuk mengetahui besarnya keuntungan yang diperoleh petani tebu, tebu yang sudah dipanen diolah menjadi gula merah tebu. Harga jual tebu tergantung dari jenis gulanya, ada gula lose, gula 1 dan gula barang.

Tebu di Kabupaten Aceh Tengah sudah menjadi industri rumah tangga, yang diolah menjadi butiran-butiran gula atau sering dikenal dengan gula merah. Gula merah sudah dikenal oleh masyarakat sebagai salah satu pemanis makanan dan minuman yang bisa menjadi substitusi gula pasir. Gula merah di peroleh dengan memeras tebu kemudian air tebu yg telah di peras di masak hingga kental dan kemudian di jemur atau dimasukkan ke dalam bak pendingin setelah itu menghancurkan gula yang masih padat.

Pemanenan tebu sudah dapat dilakukan pada umur tebu 10 – 12 bulan sebelum tebu berbunga, karena tebu sudah berumur lebih 12 bulan maka akan berpengaruh pada rendeman gula. Setelah di panen tebu harus segera dibawa untuk dimasak supaya gula yang di hasilkan bagus (gula lose). Secara teori, masa tenggang waktu antara

penebangan dan pengangkutan batang tebu ke tempat penggilingan maksimum 36 jam. Apabila tebu yang sudah dipanen terlalu lama dibiarkan di kebun atau di pabrik penggilingan (menunggu antrian) akan mengering, sehingga gula yang tersimpan dalam tebu akan berkurang. Rata-rata rendemen tebu di Kecamatan Ketol dan Kecamatan Kute Panang berkisar antar 9 – 10 persen. Maka dari itu, untuk meminimalkan kehilangan rendemen sukrosa pada tebu, petani perlu menerapkan *good agricultural practices* (GAP) serta *standar operational procedure* (SOP) dalam penanganan pasca panen tebu.

Setelah proses penebangan dan tebu diangkut ke pabrik, petani hanya membayar sewa mesin sebesar 18% dari total gula merah tebu yang dihasilkan. Upah tenaga kerja menggiling menjadi tanggungan pemilik pabrik, besarnya upah tenaga kerja sebesar Rp. 200 – Rp. 250 per kg gula merah yang dihasilkan. Selanjutnya proses menghidupkan api juga dimulai, bahan baku untuk memasak berasal dari ampas tebu. Sehingga petani tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk membeli bahan baku untuk memasak. Wajan pemasakan ini berdiameter kurang lebih satu meter dan berkapasitas  $\pm$  65-72 liter nira. Wajan-wajan tersebut diatur berundak dan agak miring untuk memudahkan pemindahan nira dari wajan satu ke wajan berikutnya.

Penambahan kapur akan mempercepat gerakan molekul-molekul cairan nira sehingga menimbulkan gerakan pada kotoran yang kemudian akan melayang ke permukaan cairan dan terapung bersama buih nira. Buih dan kotoran yang terapung tersebut harus

dibuang dengan menggunakan serok, menurut Dewi et al (2014), Hasil terbaik diperoleh pada gula merah tebu yang dihasilkan dengan suhu pemasakan 70 °C dan kecepatan pengadukan 250 rpm, yaitu diperoleh rendemen 8.23%, kadar sukrosa 75.37%, tekstur (kekerasan) 4.52 kg/cm<sup>2</sup>, dan warna gula merah yang cerah dan mempunyai intensitas yang tinggi. Selama pemasakan perlu dilakukan pengadukan untuk mempercepat penguapan air dari nira serta memberi peluang untuk pembentukan kristal gula yang kompak.

Pada saat pemasakan terjadi dua reaksi pencoklatan, yaitu karmelisasi dan reaksi Maillard. Bila gula dipanaskan di atas titik cairnya maka gula akan berwarna gelap. Pada suhu mendekati titik lebur sukrosa (185–186 °C) terjadi dekomposisi sukrosa (Eskin et al., 1971). Schallenberge (1975) menambahkan, bila sukrosa dipanaskan pada 200 °C secara terus menerus akan terjadi hidrolisis dan dehidrasi yang diikuti dimerisasi yang mengakibatkan produk tidak berasa manis. Pemasakan nira menjadi nira kental (gulali) ini berlangsung selama 3–4 jam. Gulali matang biasanya hanya tersisa pada dua wajan yang terdekat dengan sumber panas (tempat pemasakan bahan bakar). Menurut Ashari et al. (2005), semakin depan posisi wajan, nira semakin kental. Gulali pada wajan yang di depan (biasanya wajan pertama dan kedua dari depan) telah siap diangkat.

Proses pendinginan dilakukan setelah nira menjadi gulali maka diangkat ke wadah untuk didinginkan. Wadah dapat berupa bak dengan ukuran 1 x 2 meter yang terbuat dari semen atau kayu. Hal ini dilakukan untuk

mempercepat penghilangan panas sehingga gulali lebih cepat mengeras serta mencegah warna gelap gula akibat karamelisasi lanjutan. Gula Merah tebu yang agak kering dan dingin selanjutnya dilakukan penusukan atau pengahncuran sehingga diperoleh butiran-butiran gula yang lebih halus. Setelah itu, gula merah tebu ke dalam karung ukuran 50 kg kemudian ditimbang, selanjutnya petani menghubungi pedagang untuk proses penjualan. Upah memasak dibayar oleh pemilik tebu, pemilik pabrik hanya menyediakan fasilitas untuk memasak, besarnya upah memasak dihitung Rp. 350 – Rp. 450 per kg gula merah tebu yang dihasilkan. Rata-rata produksi hasil dari tebu menjadi gula merah tebu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. Rata-rata Produksi, Harga Jual dan Pendapatan Gula Merah Tebu di Daerah Penelitian, Tahun 2020

No	Uraian	Rata-rata Produksi (Kg)	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Gula Lose	8.757	5.480	47.992.241
2	Gula I	2.059	5.061	10.420.850
3	Gula Barang	2.383	4.000	9.530.797
<i>Total</i>		<i>13.198</i>		<i>67.943.888</i>

Sumber : Data Primer (diolah), 2020

Jenis gula tebu yang dihasilkan dari pengolahan tebu menjadi gula merah tebu ada tiga, yaitu 1) Gula Lose, merupakan gula dengan kualitas I dengan ciri-ciri gula berwarna coklat terang, remah dan tidak mengumpal. Untuk mendapatkan hasil gula lose, tebu yang sudah dipanen/ditebang harus segera diolah menjadi tidak lebih dari 3 x 24 jam, penggunaan gula lose diperuntukan untuk pabrik kecap seperti Indofood, ABC dan dipasarkan ke

Medan serta kota besar lainnya. 2) Gula I, merupakan gula kualitas II yang memiliki ciri-ciri warna agak kecoklatan, gula agak mengumpal. Apabila proses pengolahan tebu lebih dari waktu 3 x 24 jam maka gula yang dihasilkan menjadi gula satu; dan 3) Gula Barang, merupakan hasil gula dengan kualitas terakhir, memiliki ciri-ciri warna coklat tua dan lembek (agak mencair), gula barang diperuntukan untuk pabrik kecap yang ada di Kota Langsa dan pemanis makanan dalam daerah sendiri.

Variasi harga jual dari gula merah tebu tergantung dari jenis gula yang dihasilkan. Bila yang dihasilkan adalah gula lose, maka petani tebu akan mendapatkan pendapatan lebih banyak dari pada gula yang dihasilkan adalah gula I dan gula barang.

Tabel 7. Rata-rata Produksi, Harga Jual dan Pendapatan Gula Merah Tebu Per Hektar di Daerah Penelitian, Tahun 2020

No	Uraian	Rata-rata Produksi Per Ha (Kg)	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Gula Lose	7.319	4.581	40.112.918
2	Gula I	1.721	4.230	8.709.964
3	Gula Barang	1.992	3.343	7.966.039
<i>Total</i>		<i>11.031</i>		<i>56.788.921</i>

Sumber : Data Primer (diolah), 2020

Rata-rata harga jual gula tergantung dari gula yang dihasilkan, bila hasilnya gula lose maka akan dihargai lebih mahal sekitar Rp. 5.500 / kg, sedangkan gula I dan gula barang lebih rendah. Penggunaan gula lose diperuntukan untuk pabrik kecap seperti Indofood, ABC dan dipasarkan ke medan serta kota besar lainnya. Sesuai pendapat Hikmah (2021) bahwa usahatani tebu sudah optimal, hasil prolehan biaya produksi dan penerimaan

usahatani tebu di Kecamatan Ketol sudah optimal. Rata-rata pendapatan bersih yang akan diterima petani tebu, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8. Total Pendapatan, Total Pengeluaran dan Pendapatan Bersih Gula Merah Tebu di Daerah Penelitian, Tahun 2020

No	Uraian	Rata-rata (Rp)	Rata-rata per Ha (Rp)
1	Pendapatan	67.943.888	36.320.325
2	Pengeluaran	56.788.921	30.357.286
3	Pendapatan Bersih	31.623.563	26.431.635

Sumber : Data Primer (diolah), 2020

Pendapatan bersih yang diperoleh petani bila didistribusikan perbulan maka petani tebu akan memperoleh sebesar Rp. 2.202.636, disini biaya tenaga kerja yang dilakukan petani seperti membersihkan lahan, membuat lobang tanam, ngelentek serta panen sudah dihitung, jadi petani juga mendapat imbalan langsung dari pekerjaan yang telah dilakukan. Jadi hipotesis I, rata-rata pendapatan petani tebu sudah diatas Rp. 2.000.000 per bulan, diterima.

#### Hipotesis II.

Setelah menghitung dan mengetahui pendapatan bersih yang diterima petani tebu, ada baiknya juga mengetahui titik titik impas pulang pokok atau *Break Event Point*, baik itu BEP berdasarkan jumlah produksi gula merah tebu, harga jual gula merah tebu dan titik impas luas lahan garapan yang harus dimiliki petani supaya bisa memperoleh pendapatan yang layak. Sehingga dapat mensejahterakan kehidupan keluarganya.

#### ✚ BEP Berdasarkan Jumlah Produksi

$$BEP_{\text{Jumlah Produksi}} = \frac{36.320.325}{4.847} = 7.493 \text{ kg/tahun}$$

#### ✚ BEP Berdasarkan Harga Jual (Rp)

$$BEP_{\text{Harga Jual}} = \frac{36.320.325}{13.198} = 2.752 \text{ Rp/kg}$$

#### ✚ BEP Luas lahan garapan (*farm size*)

$$\text{Titik Impas Luas Lahan} = \frac{7.493}{13.453} = 0,56 \text{ Ha}$$

Berdasarkan analisis BEP, rata-rata petani sudah memperoleh keuntungan, bila dilihat dari jumlah produksi petani rata-rata memperoleh hasil Gula merah tebu sebesar 13.198 kg /tahun, begitu pula bila dilihat dari harga jual rata-rata harga jual Rp. 4.847 /kg. Selanjutnya untuk luas lahan, titik impas lahan garapan hanya 0,56 ha, sedangkan konsidi di Kabupaten Aceh Tengah rata-rata petani tebu memiliki lahan 1,20 ha. Jadi hipotesis II, Luas lahan yang harus dimiliki petani tebu tidak kurang dari 0,5 (setengah) hektar, diterima.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis pendapatan usahatani dari usahatani tebu yang diolah menjadi gula merah tebu, petani masih mendapatkan pendapatan yang layak, ini dilihat dari rata-rata pendapatan sebesar Rp. 2.202.636 per bulan, dengan titik impas lahan garapan hanya 0,56 ha, petani sudah balik modal. Selain itu, harga jual gula merah tebu juga sudah di atas BEP harga. sedangkan konsidi di Trans Bakal Buah, rata-rata petani kelapa sawit.

Saran yang dapat diberikan antaralain sebagai berikut, pertama, perlu adanya penggunaan bibit unggul atau bersertifikat supaya produksi dapat ditingkatkan. Serta menstandarkan hasil gula merah tebu tersebut; kedua, memperbaiki jalan usahatani, sehingga tidak ada kendala dalam mendistribukan hasil tebu ke pabrik penggilingan, sehingga tebu dapat langsung dimasak dan hasil gulanya berkualitas baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonymous, 2021. Permintaan Gula Merah Meningkat, Rafinasi Jadi Alternatif.  
<http://www.lensaindonesia.com/2012/01/24/permintaan-gula-merah-meningkat-rafinasi-jadi-alternatif-2.html>. [6 November 2021].
- Anonymous, 2021.  
<http://id.wikipedia.org/wiki/Tebu>. 20 November 2021
- Arikunto, S. 1999. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*. Bina Aksara, Jakarta.
- Ashari. 2005. *Industri Gula Merah, Aternatif Usaha Petani Tebu di Kediri*. Artikel. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi.
- Asmarantaka R.W. 2011. Analisis Daya saing Ekspor Kopi Indonesia. Di dalam : Baga LM, Fariyanti A, Jahroh S. *Kewirausahaan dan Daya saing Agribisnis*. Bogor : IPB Pr. Hlm 79-93
- Aziz, F., Indra, Karim, A. 2021. Analisis Skala Usaha Dan Finansial Minyak Sere Wangi (*Cymbopogon nardus rendle*. Lin) Di Kabupaten Gayo Lues. *Jurnal Agrica* Vol 14, No 2. Hal 171-182. DOI: <https://doi.org/10.31289/agrica.v14i2.4733>
- Bagio, Handayani, S., Nasution, A., & Zulkarnain. 2020. Analisis Pendapatan Usahatani Kelapa Sawit Di Trans Bakal Buah Kota Subulussalam. *Ekombis*, Vol 6 No 2, Hal 158–164. <https://doi.org/10.35308/ekombis.v6i2.2880>
- BPS. 2020. *Aceh Tengah dalam Angka 2020*. Badan Pusat Statistik Aceh Tengah. Takengon.
- BPS. 2020. *Aceh dalam Angka 2020*. Badan Pusat Statistik Aceh Tengah. Banda Aceh.
- Darma, R. 2011. *Pengembangan Industri Gula Tebu dan Restrukturisasi Perbesaran di Sulawesi Selatan*. Fakultas Pertanian. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Dewi, S. R., Izza, N., Agustiningrum, D. A., Indriani, D, W., Sugiarto, Y., Maharani, D, M., Yulianingsih, R. 2014. Pengaruh Suhu Pemasakan Nira Dan Kecepatan Pengadukan Terhadap Kualitas Gula Merah Tebu. *Jurnal Teknologi Pertanian* Vol. 15 No. 3. Hal 149-158
- Dumairy. 2004. *Matematika Terapan Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Media Global Edukasi.
- Eskin, N.A.M., H.M. Henderson, and R.J. Townsend. 1971. *Biochemistry of Foods*. Academic Press, New York, San Francisco. London.

- Hanani AR. dkk. 2003. Strategi Pembangunan Pertanian (Sebuah Pemikiran Baru). Yogyakarta : Pustaka Jogja Mandiri.
- Hernanto, F. 2007. Ilmu Usahatani. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Hikmah, Yulisma, R., Bagio. 2021. Optimalisasi Usaha Tani Tebu (*Saccharum Officinarum* L) di Kabupaten Aceh Tengah. Jurnal Bisnis dan Kajian Strategi Manajemen. Volume 5 Nomor 2. Hal 168 - 181
- Indra. 2011. Penentuan Skala Usaha Dan Analisis Efisiensi Ekonomi Usahatani Kopi Rakyat Di Kabupaten Aceh Tengah. Jurnal Agrisep, 12(1), 15–22. <https://doi.org/10.24815/agrisep.v12i1.206>
- Indra, Hamid, A. H., Fazlina, Y. D., Baihaqi, A., Athaillah, T. 2021. Potensi Pengembangan Kopi Robusta (*Coffea Canephora*) di Kabupaten Aceh Tenggara. JASc Vol 5, No 1. Hal 33 – 40. DOI: <http://dx.doi.org/10.30596%2Fjasc.v5i1.8141>
- Lhestari A, P, 2006. Pengaruh Waktu Tunda Giling Tebu dan Penambahan Natrium Metabisulfit terhadap Mutu Gula Merah Tebu. Skripsi pada Departemen Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Meisetyani, R., Indra, Syakur. 2021. Analisis Skala Usaha Dan Finansial Usahatani Kopi Arabika (*Coffea arabica*) Di Kabupaten Gayo Lues. Jurnal Agrica Vol 14, No 2. Hal 131-139.
- DOI: <https://doi.org/10.31289/agrica.v14i2.4731>.
- Safrida, Sofyan, Taufani, A. 2020. Dampak Impor Gula Terhadap Produksi Tebu Dan Harga Gula Domestik Di Indonesia. Agricore Volume 5 Nomor 1, Juli 2020. Hal 35 – 48
- Shallenberger, R.S. dan Birch, C.C. 1975. Sugar Chemistry. AVI, Publishing Co. Westport. Conn.
- Soekartawi. 2002. Prinsip Dasar Ekonomi Pertanian. Teori dan Aplikasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekarto, dkk. 2010. Kajian Beberapa Jenis Penggunaan Gula Merah Untuk Industri dan Pengolahan Pangan di Indonesia. <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/26796>. [17 April 2021].

# HUBUNGAN KAUSALITAS ANTARA INFRASTRUKTUR, INVESTASI DAN PDRB PER KAPITA DI ACEH

## *CAUSALITY RELATIONSHIP BETWEEN INFRASTRUCTURE, INVESTMENT AND GRDP PER CAPITA IN ACEH*

Masdi<sup>1</sup>, Irham Iskandar<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Litbang Bappeda Aceh  
E-mail: irham.iskandar84@gmail.com

### ABSTRAK

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan kausalitas antara infrastruktur, investasi dan PDRB per kapita.

Metode yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan variabel adalah infrastruktur, investasi dan PDRB per kapita. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa data runtut waktu selama periode 2006-2019. Hasil estimasi dilakukan dengan menggunakan model *granger causality test* dan uji kointegrasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; pertama, infrastruktur, PMDN, PMLN dan PDRB per kapita tidak terdapat kausalitas, namun terdapat satu hubungan satu arah, yaitu PDRB per kapita mempengaruhi PMDN; kedua, uji kointegrasi melalui Johansen Co-Integration test menunjukkan bahwa tidak ditemukan kointegrasi.

Kata kunci: Infrastruktur, PMDN, PMLN, PDRB per kapita, uji granger causality, uji kointegrasi.

### ABSTRACT

*The main objective of this study is to determine the causal relationship between infrastructure, investment and GRDP per capita.*

*The method used in this study is a quantitative approach with the variables being infrastructure, investment and per capita GRDP. The data used is secondary data in the form of time series data for the period 2006-2019. The estimation results are carried out using the Granger causality test model and the cointegration test.*

*The results showed that; first, infrastructure, PMDN, PMLN and GRDP per capita there is no causality, but there is no one-way relationship, namely GRDP per capita affects PMDN; second, cointegration test through Johansen Co-Integration test showed that no cointegration was found.*

*Keywords: Infrastructure, PMDN, PMLN, GRDP per capita, granger causality test, cointegration test.*

## PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. Laju pembangunan ekonomi seringkali diukur oleh pertumbuhan ekonomi melalui pertambahan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Nasional Bruto (PNB) yang dihasilkan oleh suatu negara (Arsyad, 2010).

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita untuk jangka panjang, sehingga persentase pertambahan jumlah output itu mestinya lebih tinggi dari persentase jumlah penduduk dan ada kecenderungan dalam jangka panjang bahwa pertumbuhan itu akan berlanjut (Tarigan, 2005).

Kalimat proses mendapat penekanan karena mengandung unsur dinamis. Teori ilmu ekonomi pembangunan masa kini masih terus menyempurnakan makna hakikat dan konsep pertumbuhan ekonomi. Teori tersebut menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dari pertambahan PDB dan PDRB, tetapi juga diberi bobot yang bersifat immaterial yaitu kenikmatan, kebahagiaan, rasa aman, dan tentram yang dirasakan masyarakat luas (Kuncoro, 2004).

Pertumbuhan ekonomi menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi. Pendapatan yang masih relatif rendah dan ditopang oleh konsumsi masyarakat tidak bertumbuh secara berkelanjutan. Menurut Kuncoro (2004), hal tersebut bisa diantisipasi melalui investasi yaitu peningkatan

produktivitas yang berdampak meningkatnya pertumbuhan ekonomi, seperti Indonesia yang berpenghasilan rendah sebagai akibat dari kesenjangan antara investasi dan tabungan serta kesenjangan devisa yang dapat dilihat pada defisit anggaran.

Suparmoko (2002) mengemukakan bahwa investasi dapat digolongkan tiga macam: pertama, investasi tetap perusahaan yang terdiri dari pengeluaran perusahaan untuk mesin-mesin, perlengkapan, bangunan yang semuanya tahan lama; kedua, investasi perumahan khususnya rumah tempat tinggal; dan ketiga, investasi penambahan persediaan.

Investasi menurut sumbernya dapat dibedakan dua bagian yaitu Pertama, investasi yang bersumber dari dalam negeri, sumber ini berasal dari tabungan sukarela masyarakat, tabungan pemerintah dan tabungan paksa; Kedua, investasi yang bersumber dari luar negeri, sumber ini dapat berupa bantuan luar negeri dan penanaman modal asing.

Sebagaimana dimuat dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non perizinan Penanaman Modal. Ada hal penting yang perlu dipahami antara lain: Pertama, penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing di wilayah negara republik indonesia; Kedua, penanam modal adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing; Ketiga,



penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal di wilayah negara republik indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri; Keempat, penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal di wilayah negara republik indonesia melalui modal asing sepenuhnya ataupun berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan jumlah modal untuk pembangunan ekonomi yang bersumber dari luar negeri.

Teori Harrod dan Domar menyatakan bahwa kunci terpenting dalam pertumbuhan ekonomi ialah investasi. Pertama, adanya pendapatan memberikan pengaruh munculnya suatu permintaan dan meningkatkan nilai dari kapasitas produksi dengan cara berupa meningkatkan stok modal sebagai dampak untuk memunculkan penawaran. Oleh sebab itu, saat investasi masih berlangsung, pendapatan yang ada dan output akan secara terus menerus semakin membesar; Kedua, pembentukan modal menentukan tumbuhnya perekonomian. Pembentukan modal dianggap sebagai pengeluaran mampu untuk menambah potensi suatu perekonomian dalam menghasilkan beberapa barang dan dapat pula dianggap sebagai pengeluaran yang mampu untuk menambah permintaan yang efektif bagi seluruh masyarakat (Jhingan 2003).

Inti teori Harrod-Domar menjelaskan bahwa perekonomian suatu negara dapat menyisihkan pendapatan nasionalnya untuk mengganti beberapa barang modal yang telah rusak menjadi baru, dengan demikian untuk meningkatkan perekonomian suatu

negara perlu adanya investasi baru. (Todaro dan Smith, 2006).

Penanaman modal sangat menentukan tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi dan percepatan pembangunan ekonomi. Hal ini diindikasikan dengan adanya peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

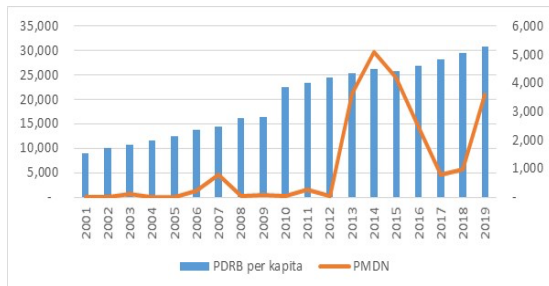
UU Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 menyebutkan bahwa salah satu tujuan dari penyelenggaraan investasi baik investasi PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) maupun PMLN (Penanaman Modal Asing) adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yang selanjutnya tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi juga akan pemeratakan dan meningkatkan kesejahteraan nasional secara kontinu yang disebut sebagai pembangunan ekonomi.

PMLN dan PMDN merupakan sumber pembiayaan yang penting dalam memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan. Sebagai salah satu komponen aliran modal, PMA dianggap sebagai aliran modal yang relatif stabil dibandingkan dengan aliran modal lainnya, misalnya investasi portofolio maupun utang luar negeri.

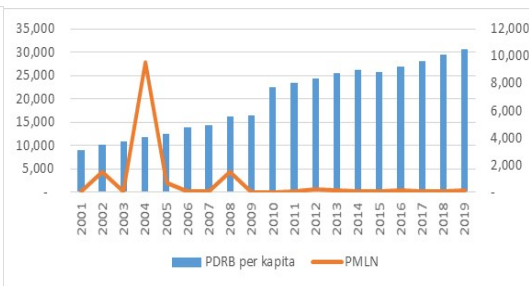
Bagaimana kondisi Aceh. Gambar 1 dan 2 menunjukkan perbandingan korelasi PDRB per kapita antara PMDN dan PMLN mengalami fluktuatif. Data menunjukkan bahwa PMDN di fase awal mengalami fluktuatif dan meningkat kembali pada tahun 2019 sebesar Rp.

3.607 (milyar), sedangkan PMLN di fase awal di tahun 2004 mengalami peningkatan sebesar Rp. 137.5 (juta US\$) dan setelah itu mengalami penurunan

secara fluktuatif. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kontribusi PDRB per kapita yang berasal dari PMDN relatif masih lebih dominan daripada PMLN.



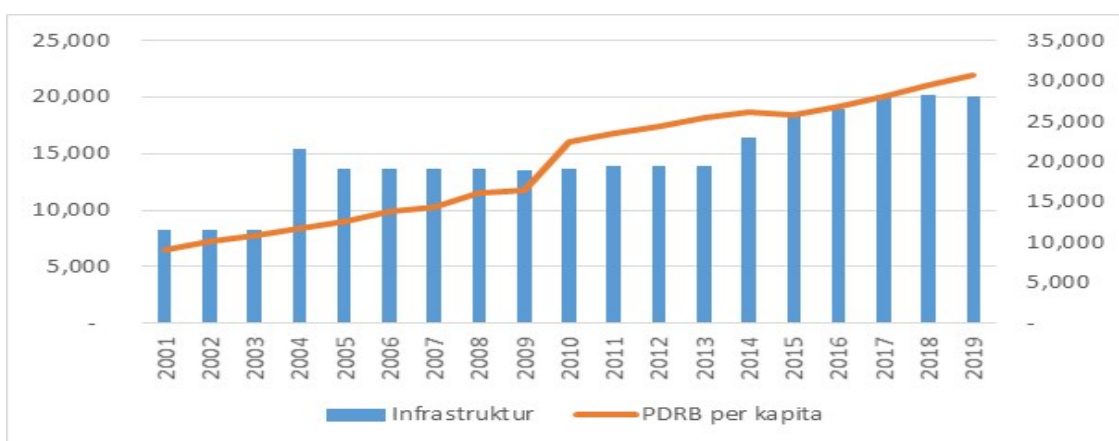
Gambar 1. Korelasi PMDN dan PDRB per kapita



Gambar 2. Korelasi PMLN dan PDRB per kapita

Demikian juga, pada Gambar 3 menunjukkan korelasi PDRB per kapita dengan infrastruktur saling berkaitan erat. Infrastruktur mengalami peningkatan dari tahun 2001 sampai dengan 2019 seiring dengan meningkatnya PDRB per kapita. Jalan merupakan salah satu infrastruktur yang sangat dibutuhkan bagi transportasi darat sebagai penghubung antar wilayah dalam mendukung perekonomian nasional.

Meningkatnya mobilitas ekonomi tahun 2002 melalui jaringan jalan nasional dan propinsi rata-rata per hari dapat mencapai sekitar 201 juta kendaraan-kilometer. Belum lagi termasuk mobilitas ekonomi yang mempergunakan jaringan jalan kabupaten sepanjang 240 ribu kilometer serta jaringan jalan desa. Artinya ada indikasi infrastruktur jalan yang dibangun selama ini memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian nasional (Kenastri, 2007).



Gambar 3. Korelasi Infrastruktur dan PDRB

Pertumbuhan ekonomi selalu didukung pembangunan di tiap daerah seperti pembangunan infrastruktur. Hal

ini dikarenakan pembangunan infrastruktur juga termasuk salah satu investasi yang dapat menaikkan

pendapatan daerah. Besarnya investasi Infrastruktur jalan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah memiliki pengaruh yang kuat terhadap perkembangan pertumbuhan ekonomi.

Istilah infrastruktur dalam kamus besar bahasa Indonesia mengandung arti sebagai sebuah sarana dan prasarana umum. Kelengkapan sarana umum dapat berupa fasilitas publik seperti kereta api, rumah sakit, jembatan, jalan, sanitasi, telepon, air bersih, listrik, sekolah dan sebagainya; sedangkan dalam ilmu ekonomi infrastruktur publik merupakan wujud dari modal publik dari investasi yang dilakukan oleh pemerintah. Infrastruktur terkait dengan jalan, jembatan, dan sistem saluran pembuangan (Mankiw, 2003).

Defenisi infrastruktur menurut Larimer (1994) adalah suatu pondasi yang mendasari pelayanan pokok, fasilitas dan institusi, namun hal ini bergantung pada pertumbuhan dan pembangunan area, komunitas dan sistem. Selain itu, infrastruktur juga menjelaskan variasi jasa, institusi dan fasilitas sistem transportasi dan sarana umum, hukum dan penegakan hukum pendidikan dan penelitian.

Sejalan dengan hal tersebut, Hirschman (1958) mengemukakan bahwa infrastruktur sebagai sesuatu yang sangat dibutuhkan, karena tanpa infrastruktur segala kegiatan produksi pada sektor kegiatan ekonomi (industri) tidak dapat berfungsi. Teori ekonomi mengidentifikasi lima saluran yang melaluinya infrastruktur dapat berdampak positif pada ekonomi pertumbuhan: (i) Infrastruktur dapat dianggap sebagai masukan langsung ke

dalam proses produksi dan karenanya berfungsi sebagai faktor produksi; (ii) infrastruktur dapat dianggap sebagai pelengkap input lain ke dalam proses produksi, dalam arti bahwa perbaikannya dapat menurunkan biaya produksi atau kekurangannya dapat menimbulkan jumlah biaya untuk perusahaan, (iii) infrastruktur dapat merangsang akumulasi faktor melalui, misalnya, penyediaan fasilitas pengembangan sumber daya manusia; (iv) investasi infrastruktur juga dapat meningkatkan permintaan agregat peningkatan pengeluaran selama konstruksi, dan mungkin selama operasi pemeliharaan; dan terakhir, (v) investasi infrastruktur juga dapat berfungsi sebagai alat untuk memandu kebijakan industri; Pemerintah mungkin akan berusaha aktifkan saluran ini dengan berinvestasi dalam proyek infrastruktur tertentu dengan tujuan memandu sektor swasta keputusan investasi (Fedderke dan Garlick, 2008).

Terkait kausalitas infrastruktur, investasi dan pertumbuhan ekonomi, Sagita (2013) menemukan bahwa tidak ada hubungan dua arah antara infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Malahan yang terjadi hubungan satu arah yaitu pertumbuhan ekonomi mempengaruhi infrastruktur, sebaliknya untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi tidak terjadi hubungan satu arah maupun dua arah.

Hasil studi empiris dalam kasus kausalitas infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi telah banyak dilakukan berbagai negara, termasuk indonesia yaitu oleh Prasetyo dan Sasana (2020) di negara ASEAN; Berk dan Bicen (2018) di Turkey; Hidayah dkk (2018) di

Sumatera Barat; Edrees (2016) di ; Simbolon (2018) di negara ASEAN; Tripathy dkk (2016) di India; Kumo (2012) di Afrika Selatan; Sebayang (2011) di Indonesia.

Begitu juga, untuk kasus kausalitas investasi dan pertumbuhan ekonomi yang dikembangkan oleh Erviana (2019) di Indonesia, Fazaaloh (2019) di Indonesia; Meyer dan Sanusi (2019) di Afrika Selatan; Bakari (2018) di Algeria; Raghdsifa dkk (2018) di Indonesia, Sothan (2017) di Kamboja; Abbes dkk (2015) di Ceko; Anguibi (2015) di Pantai Gading; Bakir dan Eryilmaz (2015) di Turki; Ullah dkk (2014) di Pakistan; Amalia (2013) di Indonesia; Yilgör dan Korkmaz (2011) di Spanyol, Prancis, Korea Selatan, dan Yunani; Hooi dan Wah (2010) di Malaysia; Wahyudi (2009) di Indonesia; Tang dkk (2008) di China.

Berdasarkan uraian diatas, tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui hubungan kausalitas antara infrastruktur, investasi dan PDRB per kapita. Hal baru yang disajikan dalam studi ini adalah melengkapi hasil studi empiris sebelumnya, data terkini dan model yang dikembangkan yaitu pertumbuhan ekonomi di proxy sebagai sebagai PDRB per kapita dan memasukkan investasi dalam negeri sebagai variabel lainnya.

## METODE

Metode yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan variabel adalah infrastruktur, investasi dan PDRB per kapita. Infrastruktur yang digunakan di sini adalah panjang jalan dalam satuan kilometer; investasi dibagi

dua yaitu investasi penanaman modal dalam negeri dalam satuan milyar rupiah dan investasi penanaman modal luar negeri dalam satuan juta US\$; Sedangkan PDRB yang digunakan adalah PDRB per kapita dalam satuan rupiah. Seluruh data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa data runtut waktu selama periode 2006-2019.

Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif, yaitu menggunakan model matematika, statistik, dan ekonometrika atau model-model ekonomi lainnya untuk menjawab hipotesis penelitian. Hasil estimasi dilakukan dengan menggunakan model uji kointegrasi dan model *granger causality test* atau disebut juga dengan metode *Engel-Granger*. Adapun langkah-langkah prosedur analisisnya sebagai berikut:

1. Uji stasioneritas (*unit root test*). Uji ini dilakukan untuk melihat data terintegrasi pada ordo yang sama atau tidak. Pengujiannya dapat dilakukan dengan uji *Augmented Dickey-Fuller* (ADF). Mengetahui H ditolak atau diterima dapat dilakukan dengan membandingkan antara t-statistic dan critical value (1%, 5%, 10%), apabila t-statistic lebih besar daripada critical value maka H di tolak. Artinya data adalah stasioner.
2. Pemilihan *lag optimal*. Pemilihan optimum lag digunakan untuk menentukan lag interval yang sesuai dalam uji kointegrasi dan kausalitas granger. Lag optimal yang terlalu pendek tidak dapat menjelaskan dinamika model secara keseluruhan, akan tetapi lag optimal yang terlalu panjang juga mendapatkan estimasi

yang tidak efisien karena mengurangi *degree of freedom*. Adapun beberapa parameter yang dapat digunakan untuk menentukan panjang lag optimal, adalah AIC (Akaike Information Criterion), SIC (Schwarz Information Criterion), LR (Likelihood ratio), FPE (Final Prediction Error), dan HQ (Hannan-Quinn Information Criterion).

3. Uji *granger causality*. Uji ini digunakan menganalisa pola hubungan kausalitas atau pun timbal balik dua variabel. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kausalitas adalah variabel X dikatakan menyebabkan Y jika variabel Y dapat dijelaskan secara lebih dengan menggunakan nilai masa lalu variabel X dibandingkan jika tidak menggunakannya (Gujarati, 2003). Selain itu, uji ini menyatakan informasi yang relevan untuk memprediksi variabel X dan Y hanya terdapat pada data time series variabel-variabel tersebut (Gujarati dan Porter, 2012).
4. Uji kointegrasi. Uji ini merupakan regresi antara satu unit *root time series* dengan unit *root time series* lainnya. Tujuannya untuk mengetahui hubungan jangka panjang antar variabel dan

sebagai pembanding terhadap kesimpulan uji kausalitas.

Akan tetapi, jika diantara dua variabel memiliki hubungan kointegrasi dan terdapat representasi ECM, maka ada indikasi terdapat kausalitas searah diantara keduanya (Gujarati dan Porter, 2012). Pengujian kointegrasi akan menggunakan metode Johansen dengan membandingkan nilai *maximum eigenvalue statistic* dan *trace statistic* dengan critical value (Shohabi, 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Stasioneritas

Uji stasioneritas bertujuan mengetahui apakah data memiliki unit root atau tidak. Pengujian stasioneritas dalam penelitian ini menggunakan uji Phillips-Perron (PP).

### Uji Phillips-Perron.

Tabel 1 pada level Phillips-Perron menunjukkan bahwa variabel PMLN yang stasioner dengan jumlah probabilitas  $< 0,05$ , sedangkan infrastruktur, PMDN dan PDRB per kapita tidak stasioner karena jumlah probabilitas  $> 0,05$ , sehingga perlu dilanjutkan pada first difference.

Tabel 1. Hasil Uji Phillips-Perron

Method	Statistic	Prob.**
PP - Fisher Chi-square	13.0388	0.1105
PP - Choi Z-stat	-0.48959	0.3122

Series	Prob.	Bandwidth	Obs
INFRASTRUKTUR	0.6700	3.0	18
PMDN	0.4435	1.0	18
PMLN	0.0055	0.0	18
PDRB_PER_KAPITA	0.8968	0.0	18

Sumber: Hasil eviews, 2020

First difference pada Tabel 2 dibawah ini menemukan bahwa variabel infrastruktur, PMLN, dan PDRB per kapita yang stasioner dengan probabilitas  $< 0,05$ , sementara probabilitas PMDN

sebesar 0,2336 melebihi tingkat signifikansi yang berarti bahwa terdapat unit root. Artinya terdapat variabel PMDN yang tidak stasioner, sehingga perlu dilanjutkan pada second difference.

Tabel 2. Hasil Uji Phillips-Perron pada first difference

Method	Statistic	Prob.**
PP - Fisher Chi-square	292.054	0.0000
PP - Choi Z-stat	-11.3083	0.0000

Series	Prob.	Bandwidth	Obs
D(INFRASTRUKTUR)	0.0010	2.0	17
D(PMDN)	0.2336	3.0	17
D(PMLN)	0.0000	16.0	17
D(PDRB_PER_KAPITA)	0.0026	1.0	17

Sumber: Hasil eviews, 2020

Langkah akhir dengan uji Phillips-Perron pada second difference, ditemukan bahwa keempat variabel yaitu infrastruktur, PMDN, PMLN dan PDRB

per kapita telah stasioner dengan probabilitas  $< 0,05$ , seperti yang tertera pada Tabel 3 dibawah ini.

Tabel 3. Hasil Uji Phillips-Perron pada second difference

Method	Statistic	Prob.**
PP - Fisher Chi-square	797.272	0.0000
PP - Choi Z-stat	-24.9499	0.0000

Series	Prob.	Bandwidth	Obs
D(INFRASTRUKTUR,2)	0.0000	15.0	16
D(PMDN,2)	0.0287	2.0	16
D(PMLN,2)	0.0000	8.0	16
D(PDRB_PER_KAPITA,2)	0.0000	13.0	16

Sumber: Hasil eviews, 2020

Berdasarkan hasil diatas dapat disimpulkan bahwa uji Phillips-Perron pada second stasioner menunjukkan variabel infrastruktur, PMDN, PMLN dan PDRB per kapita mempunyai probabilitas  $< 0,05$ . Ini mengindikasikan bahwa keempat variabel tersebut telah stasioner

### Uji Panjang Lag Optimal

Pendekatan VAR sangat sensitive terhadap jumlah lag data yang digunakan, oleh karenanya perlu ditetapkan panjang lag yang optimal. Penentuan panjang lag tersebut dimanfaatkan untuk mengetahui lamanya periode keterpengaruhan terhadap suatu variabel endogen dengan pada waktu waktu yang lalu maupun terhadap variabel endogen lainnya.

Penentuan panjang lag dapat dilihat dari nilai-nilai dari *Likelihood Ratio* (LR), *Final Prediction Error* (FPE), *Akaike Information Criterion* (AIC) dan

*Schwarz Information* (SC). Nilai-nilai dapat dilihat dari tabel 4 hasil uji panjang lag optimal dibawah ini.

Tabel 4. Hasil Uji Panjang Lag Optimum

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	-661.9793	NA	1.61e+27	73.99770	74.19556	74.02499
1	-601.4460	87.43698*	1.21e+25*	69.04956*	70.03886*	69.18597*

Sumber: Hasil views. 2020

Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai lag terdapat pada lag 1, dimana pada lag ini terhimpun nilai terendah bagi *Likelihood Ratio* (LR), *Final Prediction Error* (FPE); *Akaike Information Criterion* (AIC); *Schwarz Information Criterion* (SC); dan Hannan-Quinn (HQ). Oleh karenanya panjang lag optimumnya berada pada lag 1.

### Uji Granger Causality

Uji *Granger Causality* digunakan untuk melihat hubungan kausalitas antara

keempat variabel yang diteliti yakni kausalitas antara infrastruktur, PMDN, PMLN dan PDRB per kapita. Melalui uji tersebut dapat dilihat apakah keempat variabel tersebut memiliki hubungan yang saling mempengaruhi (hubungan dua arah), memiliki hubungan searah atau tidak ada hubungan sama sekali (tidak saling mempengaruhi). Hasil pengujian *granger causality* dapat dilihat pada tabel 5 di bawah ini

Tabel 5. Hasil Uji Granger Causality

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
PMDN does not Granger Cause INFRASTRUKTUR	17	2.36704	0.1360
INFRASTRUKTUR does not Granger Cause PMDN		2.13430	0.1611
PMLN does not Granger Cause INFRASTRUKTUR	17	2.89360	0.0943
INFRASTRUKTUR does not Granger Cause PMLN		2.71391	0.1066
PDRB_PER_KAPITA does not Granger Cause INFRASTRUKTUR	17	1.52365	0.2572
INFRASTRUKTUR does not Granger Cause PDRB_PER_KAPITA		0.53895	0.5968
PMLN does not Granger Cause PMDN	17	0.31493	0.7357
PMDN does not Granger Cause PMLN		0.24192	0.7889
PDRB_PER_KAPITA does not Granger Cause PMDN	17	6.13520	0.0146
PMDN does not Granger Cause PDRB_PER_KAPITA		0.94892	0.4144
PDRB_PER_KAPITA does not Granger Cause PMLN	17	1.71792	0.2208
PMLN does not Granger Cause PDRB_PER_KAPITA		0.21666	0.8083

Sumber: Hasil views. 2020

Berdasarkan hasil uji *granger causality* di atas, diketahui bahwa diantara kausalitas infrastruktur, PMDN, PMLN dan PDRB per kapita terdapat hubungan kausalitas satu arah, dimana PDRB per kapita mempengaruhi PMDN. Hal ini terlihat pada nilai probabilitas 0,0146 signifikan pada alpha 5%. Hasil ini menunjukkan bahwa adanya hubungan yang mempengaruhi antara PDRB per kapita terhadap PMDN di Aceh. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Erviana (2019) di Indonesia, Meyer dan Sanusi (2019) di Afrika Selatan; Ullah et. all (2014) di Pakistan; Hooi dan Wah (2010) di

Malaysia; dan Tang et. all (2008) di China.

### Uji Kointegrasi

Setelah diketahui bahwa data infrastruktur, PMDN, PMLN dan PDRB per kapita telah stasioner, maka selanjutnya akan diuji apakah terdapat hubungan keseimbangan jangka panjang antara infrastruktur, PMDN, PMLN dan PDRB per kapita. Uji kointegrasi ini bertujuan untuk mengetahui hubungan keseimbangan jangka panjang antara infrastruktur, PMDN, PMLN dan PDRB per kapita dengan menggunakan *Johansen test*.

Tabel 6. Hasil Uji Kointegrasi dengan Metode Johansen

Hypothesized No. of CE(s)	Eigenvalue	Trace Statistic	0.05 Critical Value	Prob.**
None *	0.804000	52.28437	47.85613	0.0181
At most 1	0.671219	24.58045	29.79707	0.1770
At most 2	0.254481	5.670275	15.49471	0.7341
At most 3	0.039086	0.677797	3.841465	0.4103

Sumber: Hasil eiews. 2020

Tabel 6 diatas menunjukkan bahwa tidak ditemukan tanda kointegerasi dengan lambang (\*) pada at most 1. Bila ditandai (\*\*) atau (\*) minimal satu, maka persamaan harus diselesaikan dengan metode VECM (*Vector Error Correction Model*).

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan hubungan kausalitas infrastruktur, PMDN, PMLN dan PDRB per kapita, maka dapat disimpulkan bahwa pertama, keempat variabel yaitu infrastruktur, PMDN, PMLN dan PDRB per kapita tidak

terdapat kausalitas, namun terdapat satu hubungan satu arah, yaitu PDRB per kapita mempengaruhi PMDN, kedua, uji kointegrasi melalui Johansen Co-Integration test menunjukkan bahwa tidak ditemukan kointegrasi.

Adapun rekomendasi yang diberikan dari penelitian ini adalah mengoptimalkan peran pemerintah daerah dalam infrastruktur melalui konektivitas terhadap berbagai sektor riil dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abbes, S. M., Mostéfa, B., Seghir, G. M., & Zakarya, G. Y. 2015. Causal Interactions between FDI, and Economic Growth: Evidence from Dynamic Panel Co-Integration. *Procedia Economics and Finance*, 23, 276 – 290.
- Amalia, F. 2013. Hubungan Kausalitas Investasi dengan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Signifikan*, Vol. 2 No. 1.
- Anguibi, C. F. 2015. An Investigation of the Long-Run and Causal Relationships between Economy Performance, Investment and Port Sector Productivity in Cote d'Ivoire. *Open Journal of Social Sciences*, 3, 29-38.
- Arsyad, L. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Bakari, S. 2018. The Impact of Domestic Investment on Economic Growth: New Policy Analysis from Algeria. *Bulletin of Economic Theory and Analysis*, Volume III, Issue 1, pp. 35-51.
- Bakır, H., & Eryılmaz, F. 2015. Causal relationship between foreign direct investment and economic growth: Evidence from Turkey. In *Handbook of Research on Strategic Developments and Regulatory Practice in Global Finance (Ed. Özlem Olgu)* (pp. 319- 330). USA: IGI-Global Publishing.
- Berk, N., & Biçen, S. 2018. Causality between the Construction Sector and GDP Growth in Emerging Countries: The Case of Turkey. *Athens Journal of Mediterranean Studies*, Volume 4, Issue 1 – Pages 19-36.
- Edrees, A. 2016. Human Capital, Infrastructure and Economic Growth in Arab World: A Panel Granger Causality Analysis. *Bus Eco J*, 7:1.
- Erviana, L. 2019. Hubungan Kausalitas Investasi PMDN, Investasi PMA, dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, *Jurnal Pembangunan dan Pemerataan*, Vol. 8, No. 4
- Fazaalloh, A. M. 2019. Penanaman Modal Asing dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Suatu Analisis Kausalitas. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, Vol. 12 No. 1.
- Fedderke, J., & Garlick, R. 2008. Infrastructure Development and Economic Growth in South Africa: A review of the accumulated evidence. *Policy Paper*, Number 12; School of Economics.
- Gregory., M. N. 2003. *Pengantar Ekonomi Makro. Edisi Ketiga*. Jakarta: Salemba Empat.
- Gujarati, D. N. 2003. *Basic Econometric. Third Edition*. Singapore: McGraw Hill Book Co.
- Gujarati, D. N. 2012. *Dasar-dasar Ekonometrika. Buku 2, Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hidayah, F., Azhar, Z., & Putri, D. Z. 2018. Analisis Kausalitas Pertumbuhan Ekonomi, Infrastruktur dan Penerimaan Pajak di Provinsi Sumatera Barat. *EcoGen*, Volume 1, Nomor 3.
- Hirschman, A. O. 1985. *The Strategy of Economic Development*. New Haven: Conn.: Yale University Press.
- Hooi, L. H., & Wah, T. B. 2010. Linkages Between Foreign Direct

- Investment, Domestic Investment and Economic Growth in Malaysia. *Prosiding Perkem V*, Jilid 2: 48 – 57.
- Indonesia, P. 2007. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia, P. 2015. *Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non perizinan Penanaman Modal*. Jakarta: Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1479.
- Jhingan, M. 2003. *Ekonomi Pembangunan dan Perekonomian*. Jakarta: PT. Raya Grafindo Persada.
- Kenastri. 2007. *Perumusan Strategi Pembangunan dan Pembiayaan Infrastruktur Skala Besar*. Bogor: Institut Pertanian Bogor. (n.d.).
- Kumo, W. L. 2012. Infrastructure Investment and Economic Growth in South Africa: A Granger Causality Analysis. *African Development Bank Group*, Working Paper No. 160.
- Kuncoro, M. 2004. *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: Erlangga.
- Larimer, J. 1994. Infrastructures. In *Int. Technology Res. Display Technologies in Russia, Ukraine, and Belarus*, MD, USA.: Inst. Loyola College.
- Meyer, D. F., & Sanusi, K. A. 2019. A Causality Analysis of the Relationships Between Gross Fixed Capital Formation, Economic Growth and Employment in South Africa. *Studia Universitatis Babeş-Bolyai Oeconomica*, Volume 64, Issue 1, pp.
- Prasetyo, D., & Sasana, H. 2020. Analisis Kausalitas Infrastruktur Fisik, Infrastruktur Sosial dengan Pertumbuhan Ekonomi di Asean Tahun 2008-2017. *Diponegoro Journal of Economics*, Volume 9, Nomor 4.
- Raghdhsifa H, Hasdi Aimon & Mike Triani. 2014. Kausalitas Infrastruktur Transportasi, Foreign Direct Investment (FDI) dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, *Jurnal Ecogen*, Vol. 1, No. 3
- Sagita, R. 2013. Analisis Kausalitas Infrastruktur dengan Investasi Asing untuk Meningkatkan Produk Dometik Bruto (PDB) Indonesia. *EDAJ*, 2 (4).
- Sebayang, L. K. 2011. Analisis Keterkaitan Ketersediaan Infrastruktur dengan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Pendekatan Analisis Granger Causality. *JEJAK*, Volume 4, Nomor 1.
- Shohabi, W. 2014. Kausalitas Pengeluaran Pemerintah, Inflasi, Dan Pendapatan Nasional di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Feb, 2(2).
- Simbolon., A. K. 2018. Analisis Kointegrasi dan Kausalitas Antara Infrastruktur Jalan, Perdagangan Barang dan Pertumbuhan Ekonomi di Negara Anggota Asean, *QE Journal*, Vol.07 - No. 02.

- Sothan, S. 2017. Causality between foreign direct investment and economic growth for Cambodia. *Sothan, Cogent Economics & Finance*, 5: 1277860.
- Suparmoko. 2000. *Pengantar Ekonomi Makro*. Yogyakarta: BPFE.
- Tang, S., Selvanathan, E. A., & Selvanathan, S. 2008. Foreign Direct Investment, Domestic Investment, and Economic Growth in China. *Research Paper*, No. 2008/19.
- Tarigan, R. 2005. *Ekonomi Regional*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. 2006. *Pembangunan Ekonomi (edisi kesembilan, jilid I)*. Jakarta: Erlangga.
- Tripathy, N., Srikanth, M., & Aravalath, L. M. 2016. Infrastructure Investment and Economic Growth: Evidence From India. *Journal of International Business and Economy*, 17(1): 91-111 (21 pages).
- Ullah, I., Shah, M., & Khan, F. U. 2014. Domestic Investment, Foreign Direct Investment, and Economic Growth Nexus: A Case of Pakistan. *Economics Research International*, Volume 2014, Article ID 592719, 5 pages.
- Wahyudi, S. T. 2009. The Impact of Foreign Direct Investment on Economic Growth In Indonesia, 1980-2004: A Causality Approach. *Journal of Indonesian Economy and Business*, Volume 24, Number 3, 311 – 327.
- Yıldır, M., & Korkmaz, S. 2011. dan Causality Relationship between Foreign Direct Investment and Economic Growth. *The Empirical Economics Letters*, 10(8).



# PENGARUH LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI, TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI ACEH

## *THE EFFECT OF ECONOMIC GROWTH, OPEN UNEMPLOYMENT, AND HUMAN DEVELOPMENT INDEX ON POVERTY RATE IN ACEH PROVINCE*

Yuli Rahmawati<sup>1</sup>, Khairil Anwar<sup>1</sup>

<sup>1</sup>*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh*

E-mail: [khairil.anwar@unimal.ac.id](mailto:khairil.anwar@unimal.ac.id)

### ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengaruh tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2020, pengolahan data menggunakan model regresi linier berganda, metode Ordinary Least Square (OLS). Hasil penelitian, laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. Demikian halnya dengan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di provinsi aceh. Demikian juga halnya dengan indeks pembangunan manusia berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di provinsi aceh. Pengujian secara bersama-sama variabel laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka dan indeks pembangunan manusia berpengaruh secara positif terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Aceh. Pemerintah perlu melakukan upaya nyata dan terukur dalam mengatasi kemiskinan di Provinsi Aceh, mengingat kemiskinan telah menjadi situasi tidak normal terutama berkaitan dengan hubungan pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan yang dijumpai berkorelasi positif, seharusnya negatif.

Kata kunci: Tingkat Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran Terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia

### ABSTRACT

*This study analyzes the effect of economic growth rate, open unemployment rate, and human development index on poverty rate in Aceh Province. This study uses secondary data from 2006 to 2020, data processing using multiple linear regression models, Ordinary Least Square (OLS) method. The results of the study, the rate of economic growth has a positive effect on the poverty rate in Aceh Province. Likewise, the open unemployment rate has a positive effect on the poverty rate in the province of Aceh. Likewise, the human development index has a positive effect on the level of poverty in the province of Aceh. The joint examination of the variables of the rate of economic growth, the open unemployment rate and the human development index have a positive effect on the poverty rate in the province of Aceh. The government needs to make real and measurable efforts in overcoming poverty in Aceh Province, considering that poverty has become an abnormal situation, especially with regard to the relationship between economic growth and poverty, which is found to be positively correlated, should be negative.*

*Keywords: Poverty Rate, Economic Growth, Open Unemployment and Human Development Index*

## PENDAHULUAN

Salah satu tujuan pembangunan nasional Indonesia berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum bisa dipaparkan sesuai tingkat kemiskinan di Indonesia. Adanya hubungan negatif antara kesejahteraan umum dengan tingkat kemiskinan di Indonesia. Jika tingkat kemiskinan rendah maka kesejahteraan penduduk akan meningkat. Menurut Bappenas (2008) kemiskinan adalah suatu situasi atau kondisi yang di alami oleh seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang di anggap manusiawi.

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (2019) kemiskinan di Indonesia tersebar di 34 provinsi di Indonesia, sebagian besar tingkat kemiskinan masih meningkat di daerah-daerah tertentu. Hal ini dikarenakan permasalahan kemiskinan di masing-masing daerah bervariasi, sehingga solusi untuk dapat memecahkan persoalan kemiskinan di setiap daerah pun juga akan berbeda. Untuk itu perlu dicari masalah yang menyebabkan kemiskinan di setiap daerah yang menyatakan warga negara tersebut miskin karena bergantung pada sektor pertanian yang subsistem, metode produksi yang tradisional seringkali diiringi dengan sikap apatis terhadap lingkungan (Kuncoro, 1997).

Di antara 34 provinsi di Indonesia, provinsi Aceh juga memiliki permasalahan mengenai kemiskinan. Secara nasional pada tahun 2010 Provinsi Aceh menempati peringkat ke-7 dalam ranking kemiskinan dari 34 Provinsi di Indonesia. Di tahun 2019 Provinsi Aceh menduduki peringkat kemiskinan yang paling tertinggi seluruh

Sumatera dan peringkat ke-6 seluruh Indonesia (BPS, 2020).

Memperkirakan kemiskinan, BPS (2020) memakai konsep kemampuan melingkupi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dalam pendekatan ini, kemiskinan dianggap ketidakmampuan di ekonomi dalam melingkupi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang di ukur dari pengeluaran. Penduduk miskin yaitu penduduk yang mempunyai rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan yang sudah diselesaikan oleh Badan Pusat Statistik.

Aceh adalah provinsi yang mempunyai latar belakang daerah penghasil sumber daya alam terbesar di Indonesia. Semua sumber daya ada di Aceh seperti gas alam, minyak bumi, batu dan emas. Aceh ialah penghasil sumber daya alam, akan tetapi masyarakat Aceh masih banyak berada dalam kondisi kemiskinan. Sukirno (2011) "Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang di produksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat". Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi yaitu ukuran pertumbuhan ekonomi dari satu periode ke periode lain memakai persentase. Jadi pertumbuhan ekonomi melihat prestasi untuk perkembangan dalam perekonomian dari periode ke periode lainnya.

Secara umum, pertumbuhan ekonomi yaitu peningkatan kemampuan dari perekonomian untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Pertumbuhan ekonomi yaitu indikator yang sangat dibutuhkan dalam membuat analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi di Negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana kegiatan

perekonomian yang menghasilkan pendapatan masyarakat di periode tertentu.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan yaitu keadaan utama atau suatu kewajiban bagi perkembangan pembangunan ekonomi dan syarat untuk pengurangan tingkat kemiskinan. Menurut Tambunan (2004) semakin baik pembangunan ekonomi di suatu wilayah (yang dicerminkan oleh laju pertumbuhan PDRB yang meningkat dengan tingkat ketimpangan dalam distribusi pendapatan yang rendah), maka semakin rendah kemiskinan di wilayah tersebut.

Program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Aceh tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga diharapkan mampu mengurangi jumlah penduduk miskin. Kemampuan pemerintah untuk mengurangi banyaknya penduduk miskin bisa digunakan sebagai indikator keberhasilan pembangunan. Program pembangunan dapat dikatakan mengalami kegagalan jika tidak mampu mengurangi banyaknya penduduk miskin.

Menurut Kuznet (1998) kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi itu memiliki keterkaitan yang erat, pada tahap awal dimulai suatu proses pembangunan ekonomi tingkat kemiskinan cenderung tinggi, sedangkan ketika mendekati tahap akhir dari pembangunan tersebut jumlah orang miskin berkurang. Kuznets (1998) menerangkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan kondisi dimana negara bisa mengembangkan hasil produksinya berdasarkan perkembangan teknologi yang diikuti dengan penyesuaian ideologi. Selain dari peningkatan output atau hasil produksi ekonomi, peningkatan pendapatan daerah dan pendapatan per kapita juga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi,

karena jika pendapatan daerah dan pendapatan per kapita bertambah maka tingkat konsumsi juga bertambah sehingga laju pertumbuhan ekonomi meningkat yang akan menurunkan jumlah kemiskinan.

Selain itu, tingkat pengangguran terbuka juga sangat erat kaitannya dengan Tingkat Kemiskinan. Salah satu unsur yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatan. Pendapatan tertinggi ketika kondisi tingkat tenaga kerja penuh (*full employment*) dapat terealisasi. Pengangguran membuat pendapatan masyarakat berkurang, dan dengan begitu akan mengurangi tingkat kemakmuran yang tercapai. Semakin rendahnya tingkat kemakmuran akan muncul masalah lain yaitu kemiskinan (Sukirno) 2000. Pengangguran adalah banyaknya tenaga kerja di perekonomian yang secara bersungguh-sungguh mencari pekerjaan tetapi belum tercapai (Sukirno, 2004). Semakin tingginya pengangguran, maka semakin tidak efisien pula perekonomian di wilayah tersebut.

Dampak buruk dari pengangguran adalah mengurangi penghasilan masyarakat yang akhirnya mengurangi tingkat kesejahteraan yang sudah dicapai seseorang (Sukirno) 2004. Semakin menurunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki penghasilan. Jika pengangguran di suatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu terjadi dalam prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dirumuskan pada tahun 1990 oleh UNDP (United Nations Development Programme). Menurut UNDP, pembangunan manusia merupakan perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging*

*the choices of people*), yang dapat di lihat sebagai proses upaya ke arah perluasan pilihan dan sekaligus sebagai taraf yang di capai dari upaya tersebut.

IPM merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup untuk semua Negara. Indeks pembangunan manusia digunakan sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan dan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah Negara termasuk Negara maju, Negara berkembang, atau Negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Indeks Pembangunan Manusia juga sangat erat kaitannya dengan tingkat kemiskinan. Kualitas sumber daya manusia juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya penduduk miskin. Menurunnya IPM bakal berdampak pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Untuk mempunyai manusia yang berkualitas dibutuhkan usaha meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Kualitas manusia bisa diukur dengan ipm. Indeks Pembangunan Manusia adalah indikator yang mendeskripsikan bagaimana penduduk bisa mengakses hasil pembangunan untuk memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan. Rendahnya IPM berpengaruh pada

berkurangnya produktivitas kerja oleh penduduk, produktivitas yang berkurang akan berakibat rendahnya perolehan pendapatan, lalu dengan rendahnya pendapatan mengakibatkan meningkatnya jumlah penduduk miskin (Sukmaraga, 2011)

Rendahnya IPM akan menyebabkan pada turunya produktivitas kerja dari penduduk, produktivitas yang menurun menyebabkan menurunnya perolehan penghasilan, hingga dengan menurunnya penghasilan menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk miskin (Sukmaraga) 2011. Jika kualitas sumber daya manusia meningkat, yang tercermin dari tingkat pendidikan dan kesehatan yang tinggi akan menyebabkan produktivitas yang tinggi sehingga terjadi peningkatan pendapatan. Tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan tingkat pendapatan yang tinggi juga akan tercermin pada IPM yang tinggi. Maka sebab itu cara meningkatkan kualitas pembangunan manusia baik dari aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi terus dilakukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

Perkembangan tingkat kemiskinan, laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka dan IPM Provinsi Aceh dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Tingkat Kemiskinan, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh

Tahun	TK (%)	LPE (%)	TPT (%)	IPM (%)
2006	28,28	4,83	9,45	69,41
2007	26,65	6,35	9,84	70,35
2008	23,53	1,88	9,56	70,76
2009	21,80	3,92	8,71	70,35
2010	20,98	5,91	8,37	67,09
2011	19,57	4,38	7,43	67,45
2012	17,60	4,95	9,10	67,81



Tahun	TK (%)	LPE (%)	TPT (%)	IPM (%)
2013	17,60	4,15	10,30	68,30
2014	18,05	4,02	9,02	68,81
2015	17,80	4,28	9,93	69,45
2016	16,73	4,26	7,57	70,00
2017	16,89	4,13	6,57	70,60
2018	15,97	4,49	6,34	71,19
2019	15,01	4,19	6,17	71,90
2020	15,43	-0,74	6,59	71,99

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia

Tabel 1 menunjukkan bahwa Tingkat Kemiskinan mengalami penurunan secara signifikan kecuali pada tahun 2014 dan 2017 yang mengalami peningkatan. Hal ini terjadi dikarenakan adanya dua faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari keterbatasan pendidikan, modal, dan beban keluarga. Faktor eksternal terdiri dari kurangnya lapangan pekerjaan dan lainnya. Di saat terjadi musibah Covid di seluruh dunia pada tahun 2020, Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh mengalami peningkatan kembali sebesar 15,43% dari tahun 2019 yang sebesar 15,01%.

Berdasarkan tabel 1, dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh, mengalami pasang surut, dimana laju pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2010 mencapai 5,91% dan laju pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar -0,74%. Hal ini juga merupakan dampak dari COVID-19 yang melanda seluruh provinsi di Indonesia termasuk Provinsi Aceh.

Data pada tabel 1 Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh pada tahun 2006 sampai tahun 2020 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013 Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh sangat tinggi mencapai 10,30%. Hal ini dikarenakan kurangnya pendidikan dan keterampilan, ketidakseimbangan antara pekerjaan dan jumlah tenaga kerja, dan lain-lain. Sehingga menyebabkan Pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh pada tahun 2013 meningkat. Pada tahun 2020 Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh mengalami peningkatan juga

dikarenakan dampak COVID-19 disetiap provinsi yang ada di Indonesia.

Tabel 1 juga menyajikan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh setiap tahunnya mengalami peningkatan, tetapi pada tahun 2010 IPM di Provinsi Aceh menurun karena memakai perhitungan metode baru, nilai hasil yang didapat lebih rendah dibandingkan dengan metode lama. Hal ini di pengaruhi oleh perubahan indikator dan metodologi yang di pakai.

## METODE

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah variabel-variabel tingkat kemiskinan, laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka dan indeks pembangunan manusia. Lokasi penelitian ini di teliti di Provinsi Aceh.

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan jenis *data time series* selama jangka waktu 15 tahun yang diambil dari periode tahun 2006 hingga tahun 2020. Adapun data yang diperoleh oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini yaitu berasal dari situs resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh (BPS).

Untuk memecahkan masalah pada penelitian ini maka penulis melakukan analisis data dengan memakai metode kuantitatif dengan menggunakan alat statistik yaitu program Eviews versi 10 dengan prosedur metode ordinary least squares (OLS) yang berupa metode Regresi Linier Berganda sebagai berikut:

$$TK = \beta_0 + \beta_1 LPE + \beta_2 TPT + \beta_3 IPM + e$$

Keterangan:

TK	=	Tingkat Kemiskinan
LPE	=	Laju Pertumbuhan Ekonomi
TPT	=	Tingkat Pengangguran Terbuka
IPM	=	Indeks Pembangunan Manusia
$B_1, \beta_2, \beta_3$	=	Koefisien Regresi Variabel Bebas
$e$	=	Standar Error

Sebelum data diestimasi dengan model sebagaimana yang telah disebutkan di atas, terlebih dahulu akan dilakukan pengujian persyaratan regresi (uji asumsi klasik), yaitu:

### Uji Normalitas

Uji normalitas dihitung untuk mengetahui hasil penelitian terdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan metode Jarque-Bera (J-B). Jika nilai *probability* dari statistik J-B lebih besar dari taraf kepercayaan 5% (0,05) berarti bahwa residul data berdistribusi normal begitupun sebaliknya.

### Uji Asumsi Klasik

Adapun uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas bertujuan untuk menguji ada tidaknya korelasi yang tinggi atau yang sempurna antar variabel independen yang terdapat pada model regresi. Multikolinearitas dapat dilihat dari *Variance Inflation Factors* (VIF). VIF mencoba melihat bagaimana varian dari suatu penaksir (*estimator*) meningkat seandainya ada multikolinearitas di suatu model empiris. Jika VIF dari suatu variabel melebihi 10, maka suatu variabel dikatakan berkorelasi sangat tinggi (Gujarati) 2012.

#### 2. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah pada sebuah model regresi linear ada kesalahan pengganggu pada periode t

dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Kriteria untuk mendeteksi ada tidaknya masalah autokorelasi adalah jika nilai probabilitas  $Obs^*R\text{-squared} > (5\%)$ , tidak terjadi autokorelasi. Jika nilai probabilitas  $Obs^*R\text{-squared} < (5\%)$ , berarti terjadi autokorelasi.

### 3. Uji Heteroskedastisitas

Adanya heteroskedastisitas mengalami estimasi koefisien-koefisien regresi menjadi tidak efisien. Model regresi yang baik ialah bebas dari gejala heteroskedastisitas. Pengujian masalah heteroskedastisitas menggunakan *Uji Glejser Test* (Gujarati) 2012. Jika nilai probabilitas  $Obs^*R\text{-squared}$  lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

### Pengujian Hipotesis

#### 1. Uji Parsial (Uji t)

Uji t memastikan betapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menjelaskan variasi variabel terikat (Kuncoro) 2009. Pengambilan keputusan berdasarkan jika nilai p-value < taraf signifikansi 5% maka terdapat pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.

#### 2. Uji Simultan (Uji f)

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah keseluruhan variabel independen berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen (Kuncoro) 2009. Jika  $F\text{-hit} > F\text{-tabel}$  dengan tingkat signifikan 5%, maka bisa disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika  $F\text{-hit} < F\text{-tabel}$  dengan tingkat signifikan 5% maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

#### 3. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah satu ukuran yang digunakan untuk mengukur

pengaruh variabel independen terhadap variansi dependen, dengan  $0 < R^2 < 1$ . Koefisien determinasi pada regresi linier sering diartikan sebagai seberapa besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan variansi dari variabel terikatnya.

#### 4. Koefisien Korelasi (R)

Menurut (Sugiyono 2013) Koefisien korelasi (R) merupakan gambaran untuk melihat pengaruh keseluruhan variabel yang dapat dibandingkan dengan penelitian lain.

Pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien sebagai berikut (Sugiyono, 2013):

- $>0,00 - 0,199$  = sangat rendah
- $>0,20 - 0,399$  = rendah
- $>0,40 - 0,599$  = sedang
- $>0,60 - 0,799$  = kuat
- $>0,80 - 0,99$  = sangat kuat
- $>1$  = korelasi sempurna

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Analisis Data

Untuk melihat hasil estimasi model penelitian data yang diolah dengan bantuan program Eviews versi 10 maka diperoleh hasil perhitungan analisis regresi seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini:

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Dependent Variable: TK				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-48.99794	24.85815	-1.971101	0.0537
LPE	0.782216	0.286544	2.729829	0.0085
TPT	1.777947	0.320484	5.547702	0.0000
IPM	0.723949	0.332402	2.177931	0.0336
R-squared	0.437174	F-statistic		14.49931
Adjusted R-squared	0.407023	Prob(F-statistic)		0.000000
		Durbin-Watson stat		0.173037

Sumber: Data diolah, 2021.

Dari tabel di atas dapat diinterpretasikan hasil analisis regresi linear berganda yaitu sebagai berikut:

$$TK = -48.99794 + 0.782216LPE + 1.777947TPT + 0.723949IPM$$

Interpretasi:

1. Bahwa nilai konstanta sebesar -48.99794 bernilai negatif yang menunjukkan apabila variabel laju pertumbuhan ekonomi, variabel tingkat pengangguran terbuka, dan variabel indeks pembangunan manusia dianggap tidak

ada atau sama dengan nol. Maka variabel dependen tingkat kemiskinan akan semakin berkurang.

2. Koefisien variabel laju pertumbuhan ekonomi mempunyai nilai sebesar 0.782216. Hal ini menunjukkan hubungan positif. Artinya apabila laju pertumbuhan ekonomi meningkat, maka tingkat kemiskinan juga akan meningkat.
3. Koefisien variabel tingkat pengangguran terbuka mempunyai nilai sebesar

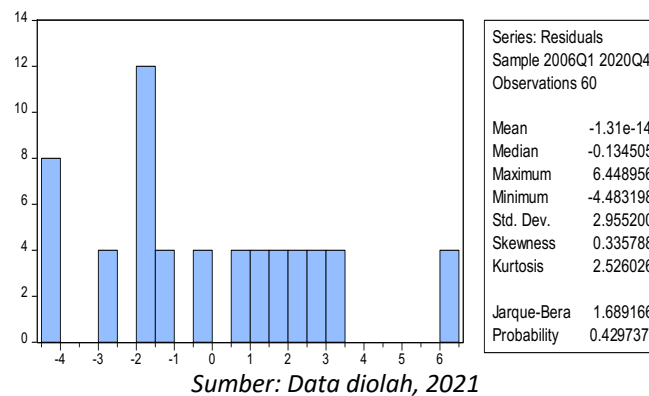
1.777947. Hal ini menunjukkan hubungan positif. Artinya apabila tingkat pengangguran terbuka meningkat, maka tingkat kemiskinan juga akan meningkat.

4. Koefisien variabel indeks pembangunan manusia mempunyai nilai sebesar 0.723949. Hal ini menunjukkan hubungan positif. Artinya apabila indeks

pembangunan manusia meningkat, maka tingkat kemiskinan juga akan meningkat.

### Uji Normalitas

Normalitas data diuji dengan Jarque-Bera (JB-Test), hasil pengujiannya sebagaimana disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1 Uji Normalitas

Uji normalitas menggunakan metode Jarque-Bera (JB-Test). Hasil pengujiannya menghasilkan probabilitas > 0,05 (0,429737 > 0,05). Berdasarkan hasil

tersebut maka dapat disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi kenormalan.

### Uji Asumsi Klasik

#### 1. Uji Multikolonieritas

Tabel 3. Hasil Uji Multikolonieritas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	617.9278	4029.501	NA
LPE	0.082108	10.22074	1.366046
TPT	0.102710	47.76235	1.287823
IPM	0.110491	3501.652	1.610012

Sumber: Data diolah, 2021.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel bebas yang mempunyai nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bebas dari adanya multikolonieritas.

#### 2. Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi menunjukkan nilai Prob. Chi-Square(2) yang merupakan nilai p value uji *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM* sebesar

0,3340. Nilai Prob. Chi-Square(2) ternyata lebih besar dari taraf signifikansi 5% atau 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi dalam model regresi yang akan digunakan.

### 3. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian Heteroskedastisitas dilakukan dengan metode Chi-Square Test, hasil pengujian sebagaimana dapat dilihat pada Tabel

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

F-statistic	0.025909	Prob. F(3,51)	0.9943
Obs*R-squared	0.083696	Prob. Chi-Square(3)	0.9937
Scaled explained SS	0.118032	Prob. Chi-Square(3)	0.9896

Sumber: Data diolah, 2021.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai p value ditunjukkan dengan nilai Prob. Chi-Square memiliki nilai yang lebih besar dari tingkat signifikansi 5% atau 0,05 ( $0,9937 > 0,05$ ). Hal ini menunjukkan bahwa dalam model

regresi yang dipakai tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

### Pengujian Hipotesis

#### 1. Uji Parsial (Uji t)

Hasil pengujian secara parsial, ditampilkan pada Tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Variabel Bebas	t-Statistik	t-Tabel	Prob	Keterangan
LPE	2.729829	1.67252	0.0085	Signifikan
TPT	5.547702		0.0000	Signifikan
IPM	2.177931		0.0336	Signifikan

Sumber: Data diolah, 2021.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi yaitu 2.729829 lebih besar dari 1.67252 ( $2.729829 > 1.67252$ ). Artinya, laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. Bisa dilihat dengan nilai probabilitas yang lebih kecil dari alpha 0.05 ( $0.0085 < 0.05$ ).

Untuk variabel tingkat pengangguran terbuka yaitu 5.547702 lebih besar dari 1.67252 ( $5.547702 > 1.67252$ ). Artinya, tingkat pengangguran terbuka berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi

Aceh. Bisa dilihat dengan nilai probabilitas yang lebih kecil dari alpha 0.05 ( $0.0000 < 0.05$ ).

Untuk variabel laju pertumbuhan ekonomi yaitu 2.177931 lebih besar dari 1.67252 ( $2.177931 > 1.67252$ ). Artinya, laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. Bisa dilihat dengan nilai probabilitas yang lebih kecil dari alpha 0.05 ( $0.0336 < 0.05$ ).

#### 2. Uji Simultan (Uji F)

Adapun pengujian secara simultan, ditampilkan pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6. Hasil Uji Simultan (Uji f)

F-Statistik	F Tabel	Prob	Keterangan
14.49931	2.77	0.000000	<b>Signifikan</b>

Sumber: Data diolah, 2021.

Karena F statistik lebih besar dari F tabel, artinya laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka dan indeks pembangunan manusia secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

### 3. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai Adjusted R-Squared dalam penelitian ini sebesar 0.407023. Artinya, hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat dalam penelitian ini sebesar 40,70% . Dan  $1 - 0.407023 = 0.592977$  yang berarti 59,29% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

### 4. Koefisien Korelasi (R)

Pada penelitian ini nilai korelasi (r) atau R-Squared adalah sebesar 0.437174 atau sebesar 43,71 maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan terdapat hubungan korelasi yang sedang antara variabel dependen dengan variabel independen.

### Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial dalam model regresi linear berganda sebelumnya, maka diketahui variabel laju pertumbuhan ekonomi (X1) memiliki pengaruh yang positif terhadap variabel tingkat kemiskinan.

Hal ini tidak sesuai dengan teori hipotesis awal dalam penelitian ini. Kondisi yang seperti ini sejalan dengan teori Mankiw, dimana disebutkan bahwa

jika Negara menanam modal dengan memberikan perhatian khusus pada bidang pendidikan atau membuka usaha di wilayah kemiskinan tertinggi untuk masyarakat, maka akan membuat laju pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik. Tetapi penanaman modal atas sumber daya manusia melalui pendidikan akan menaikkan pendapatan nasional/pergerakan perekonomian yang tinggi.

Jika penanaman modal dilakukan lebih terdistribusi merata termasuk didalamnya golongan berpenghasilan rendah maka kemiskinan menurun. Secara langsung ini dapat berarti bahwa pertumbuhan harus dipastikan mencapai lokasi/bagian dimana penduduk miskin bekerja seperti di pertanian dan perkebunan. Secara tidak langsung diperlukan peran pemerintah yang efektif dalam meratakan pemanfaatan perkembangan tersebut.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Umaruddin Usman dan Diramita dalam judul pengaruh jumlah penduduk, pengangguran dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di provinsi kepulauan riau menyatakan bahwa dimana secara parsial penelitian yang dilakukan menunjukkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau. Begitu juga dengan penelitian Ginting dan Rasbin (2010) dalam judul pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di indonesia sebelum dan setelah krisis yang

penelitiannya mendapatkan hasil bahwa laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Dan juga penelitian dari Sembiring, dkk (2020) dalam judul pengaruh pertumbuhan ekonomi, ipm, pengangguran terbuka, dan angkatan kerja terhadap kemiskinan di Sumatera utara yang dalam penelitiannya mendapatkan hasil bahwa laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Utara.

### **Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan**

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial dalam model regresi linear berganda sebelumnya, maka diketahui variabel tingkat pengangguran terbuka (X2) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel tingkat kemiskinan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sembiring, dkk (2020) dalam judul pengaruh pertumbuhan ekonomi, ipm, pengangguran terbuka, dan angkatan kerja terhadap kemiskinan di Sumatera utara yang dalam penelitiannya mendapatkan hasil bahwa pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera utara. Begitu juga dengan Shinta Setya Ningrum dalam judul analisis pengaruh tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia, dan upah minimum terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2011-2015 yang dalam penelitiannya mendapatkan hasil bahwa pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia. Safuridar dan Putri (2019) dalam judul pengaruh ipm,

pengangguran dan jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Aceh bagian timur yang dalam penelitiannya mendapatkan hasil bahwa pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Aceh Bagian Timur.

### **Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan**

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial dalam model regresi linear berganda sebelumnya, maka diketahui variabel indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Hal ini tidak sesuai dengan teori hipotesis awal dalam penelitian ini. Teori hipotesis awal dalam penelitian ini menyatakan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Yang mana apabila indeks pembangunan manusia meningkat maka kemiskinan akan menurun. Akan tetapi hasil pengujian penelitian ini menyatakan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh positif dan signifikan. Yang mana apabila indeks pembangunan manusia meningkat kemiskinan juga akan meningkat.

Karena kualitas dalam pelayanan seperti di bidang kesehatan dan pendidikan tidak merata. Baik dari segi pelayanan atau akses yang masih sulit untuk dirasakan di wilayah yang kemiskinannya tinggi. Sehingga di wilayah tersebut indeks pembangunan manusianya rendah dan akan mengakibatkan seseorang tidak bisa bekerja sehingga tidak mempunyai pendapatan. Pengangguran pun bertambah dan kemiskinan akan meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Safuridar dan Putri (2019) dalam

judul pengaruh indeks pembangunan manusia, pengangguran dan jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di aceh bagian timur yang dalam penelitiannya mendapatkan hasil bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di aceh bagian timur. Begitu juga dengan penelitian saparuddin, dkk dalam judul analisis pengaruh indeks pembangunan manusia dan tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan di indonesia yang dalam penelitiannya mendapatkan hasil bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.

## KESIMPULAN

Laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. Demikian halnya dengan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di provinsi aceh. Demikian juga halnya dengan indeks pembangunan manusia berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di provinsi aceh. Pengujian secara bersama-sama variabel laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka dan indeks pembangunan manusia berpengaruh secara positif terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Aceh.

Selain itu, rekomendasi dari penelitian yaitu; pertama, pemerintah daerah harus membuat kebijakan dan mengambil peranan yang cukup besar untuk dapat mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia yang lebih baik dengan menaikkan kapasitas produksi masyarakat agar mengurangi jumlah penduduk miskin

di Provinsi Aceh sehingga bisa menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. Pemerintah juga harus membuat kebijakan penurunan tingkat pengangguran terbuka seperti, memberikan pendidikan dan latihan kerja, memperluas kesempatan kerja, mengembangkan dan meningkatkan kegiatan wirausahayang dibekali dengan pelatihan khusus dari instansi atau lembaga terkait, dan mempercepat industrialisasi di sektor perekonomian di daerah pedesaan, supaya menyerap banyak tenaga kerja. Dengan kebijakan tersebut tingkat kemiskinan akan berkurang; kedua, menjadi bahan acuan bagi penelitian selanjutnya yang tertarik buat meneliti Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan pada Provinsi Aceh. Untuk keperluan diskusi menyeluruh lebih lanjut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Ginting, Charisma K.S. 2008. Analisis Pembangunan Manusia di Indonesia. *Tesis*. Sekolah Pasca Sarjana Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Gujarati, Damodar N. 2012. *Dasar-dasar Ekonometrika*. Buku 2 Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Kuncoro, Mudrajad. 1997. *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*. Cetakan pertama. Unit Penerbitan dan Percetakan Akademi. Manajemen Perusahaan YKPN. Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Edisi 3.



- Penerbit Erlangga.
- Prima Sukmaraga. 2011. *Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB Per Kapita, dan jumlah pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Tengah*. Universitas Diponegoro.
- Sembiring, F., Tarmizi, T., & Rujiman, R. 2020. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, IPM, Pengangguran Terbuka dan Angkatan Kerja Terhadap Kemiskinan di Sumatera Utara. *Jurnal Serambi Engineering*, 5(2). <https://doi.org/10.32672/jse.v5i2.1925>.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, S. 2000. *Pengantar Teori Makroekonomi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sukirno, S. 2004. *Pengantar Teori Makroekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukirno. 2011. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tambunan, Tulus. 2004. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia. *Kajian Ekonomi*. Vol.03. No. 02, Universitas Sriwijaya.
- United Nations Development Programme (UNDP). 1990. *Global Human Development Report*. Human Resources Department.



**DETERMINAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA DAERAH  
(Sebuah Bukti Empiris)**

**DETERMINANTS OF CHANGES IN THE REGIONAL EXPENDITURE  
BUDGET  
(An Empirical Evidence)**

Fadhlon Ramadhan<sup>1</sup>, Syukriy Abdullah<sup>1</sup> Syukur Selamat Karo-karo<sup>2</sup>, Riha Dedi  
Priantana<sup>1</sup>

1). Fakultas Ekonomi dan Bisnis USK

2). Inspektorat Aceh Tenggara

E-mail: [:syukriyabdullah@unsyiah.ac.id](mailto:syukriyabdullah@unsyiah.ac.id).

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh perubahan anggaran pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan (DP), dan sisa anggaran (SiLPA) terhadap perubahan anggaran belanja (PAB) pada pemerintah daerah. Data sekunder yang digunakan bersumber dari dokumen peraturan daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Indonesia yang diperoleh melalui internet untuk tahun anggaran 2013. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota dengan sampel sebanyak 70 pemerintah daerah, yang dipilih secara *purposive* dengan pencarian di Google. Pengujian hipotesis menggunakan model regresi linear berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa PAD, DP, dan SiLPA secara sendiri-sendiri dan bersama-sama berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja daerah. Implikasi terhadap riset berikutnya adalah perlunya dilakukan analisis mendalam tentang kebijakan perubahan anggaran belanja yang dikaitkan dengan anggaran pendapatan awal dan SiLPA karena adanya kecenderungan terjadi *moral hazard* dalam proses penentuan prioritas belanja daerah pada pejabat daerah.

**Kata kunci:** prioritas belanja, masalah keagenan, SiLPA, pendapatan transfer, perilaku oportunistis.

**ABSTRACT**

*The purpose of this study was to examine the effect of changes in the regional original revenue budget (PAD), balancing funds (DP), and remaining budget (SiLPA) on changes in the regional government budget (PAB). The secondary data used by the government is sourced from regulatory documents regarding Changes in the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) in Indonesia which were obtained via the internet for the 2013 fiscal year. The population in this study were districts/cities with a sample of 70 regions, which were selected purposively by searching on Google. Hypothesis testing using multiple linear regression model. The results of the analysis show that PAD, DP, and SiLPA individually and jointly have an effect on changes in regional budgets. The implication for the next research is the need for an in-depth analysis of future budgetary*

---

*policies and SiLPA because of the tendency of moral hazard in the regional spending process for regional officials.*

*Keywords: spending priorities, agency problems, SiLPA, income transfer, opportunistic behavior.*

## **PENDAHULUAN**

Perubahan anggaran daerah<sup>3</sup> merupakan fenomena yang rutin dilakukan dalam penganggaran pemerintah daerah di era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia, namun mengandung persoalan-persoalan keagenan (*agency problems*) yang berpangkal dari kepentingan politik dan prinsip aji mumpung (*opportunistic behavior*). Selain menjadi ruang untuk memperbaiki kinerja anggaran daerah (Anessi-Pessina, et al., 2012), juga menjadi kesempatan untuk mengeksekusi kepentingan jangka pendek para *budget actors* (Abdullah, 2013). Ketidakakurasian dalam memprediksi kebutuhan anggaran ril pada saat penyusunan anggaran awal dapat diperbaiki melalui penyesuaian anggaran ini (Forrester & Mullins, 1992).

Perubahan anggaran belanja daerah berkaitan dengan realisasi pendapatan dan belanja di semester pertama tahun berjalan dan perubahan asumsi atas anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun berjalan yang telah ditetapkan pada

akhir tahun sebelumnya. Perubahan anggaran belanja yang disebabkan oleh realisasi pendapatan dan belanja selama satu semester pertama tahun berjalan dilakukan untuk menyesuaikan anggaran dengan realisasinya, sehingga dapat diperoleh capaian kinerja seratus persen (jumlah rupiah dalam anggaran dan realisasinya sama).

Realisasi PAD pada semester pertama tidak selalu sama dengan anggarannya dikarenakan adanya kecenderungan terjadi *overestimate* atau *underestimate* dalam penentuan targetnya (terjadi *budget slack*). Ketidakakurasian dalam menentukan target PAD ini sering menjadi pertimbangan penting dalam penyesuaian anggaran di tahun berjalan. Persoalan keagenan sering muncul dipihak eksekutif (sebagai *agent*) dalam pengusulan target PAD karena potensi sesungguhnya tidak diketahui oleh legislatif (sebagai *principal*). Asimetri informasi yang terjadi menyebabkan selisih antara anggaran dan realisasi PAD memiliki pengaruh terhadap belanja daerah.

Perubahan kebijakan transfer dari pemerintah pusat juga mempengaruhi perubahan alokasi anggaran belanja daerah (Abdullah & Halim, 2003; Nawawi, 2021). Penyesuaian atas dana transfer yang dilakukan oleh pemerintah pusat, khususnya untuk dana bagi hasil (DBH), menyebabkan pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian terhadap belanja daerahnya. Sebagian komponen DBH sudah diperuntukkan penggunaannya (*erarmark*), sehingga pemerintah daerah perlu melakukan pergeseran belanja atau menambah alokasi belanja untuk kegiatan baru.

Perubahan anggaran juga terjadi karena alasan asumsi anggaran awal yang ditetapkan sebelumnya yang tidak sesuai dengan kenyataan riil, dan dilakukan setelah hasil audit oleh pemeriksa eksternal diperoleh, khususnya terkait kepastian tentang besaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Besaran SiLPA yang ditetapkan dalam hasil audit tersebut merupakan angka definitif atau permanen, sementara SiLPA dalam APBD tahun berjalan masih bersifat tentatif atau prediksi di akhir tahun sebelumnya. SiLPA dalam APBD awal mengandung persoalan keagenan karena dapat digunakan untuk “menampung” kepentingan para pembuat

anggaran, terutama politisi (Fozzard, 2001; Isaksen, 2005).

Fenomena perubahan anggaran pemerintah dengan menggunakan perspektif hubungan keagenan (*principal-agent relationship*) belum banyak diteliti, khususnya untuk konteks pemerintah daerah di Indonesia. Analisis ini penting dilakukan untuk memahami perilaku dalam pembuatan kebijakn pengalokasian sumberdaya, khususnya dalam tahun berkenaan melalui revisi anggaran yang jarang mendapat sorotan publik. Beberapa studi terdahulu yang menguraikan masalah ini diantaranya adalah Asmara (2010), Abdullah & Rona (2014), Martunis, et al. (2014), Amran, et al. (2015), Junita (2015), Junita & Abdullah (2016), Nellyanti, et al. (2016), Adi (2018), dan Junita, et al. (2018). Proses penyusunan APBD murni dan perubahan sebenarnya tidak berbeda (Anessi-Pessina, et al., 2012), politik dan atensi publik sering melihatnya berbeda.

Tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan (DP), dan sisa anggaran (SiLPA) terhadap perubahan anggaran belanja (PAB) dan memberi bukti empiris bahwa PAD, DP dan SiLPA berpengaruh terhadap PAB. Hasil ini bermanfaat bagi pengambil keputusan untuk lebih cermat dalam mengalokasikan

sumber penerimaan ke dalam belanja sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya.

## METODE

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota se Indonesia yang berjumlah 491 Kabupaten dengan sampel sebanyak 70 pemerintah daerah. Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria sampel yang ditetapkan adalah (1) kabupaten/kota yang memiliki defisit anggaran pada tahun 2016 dan (2) perda tentang perubahan APBD bisa diakses/diunduh melalui internet dengan menggunakan mesin pencari google.com.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah perubahan anggaran belanja (PAB). PAB diukur dengan cara menghitung selisih antara angka anggaran belanja setelah perubahan dengan angka anggaran belanja sebelum perubahan atau angka anggaran belanja dalam APBD murni (awal tahun).

Selain itu, variabel Independen dalam penelitian ini adalah sisa anggaran, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan. Sisa Anggaran (SPA). Sisa anggaran, sering juga disebut SiLPA,

adalah kas daerah yang belum terpakai atau masih tersisa pada akhir tahun anggaran yang dapat dipakai pada tahun anggaran berikutnya. Pada awal tahun anggaran berikutnya, sisa anggaran ini akan menjadi SiLPA (sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu). Sisa anggaran dalam penelitian ini diukur dengan menghitung selisih antara SiLPA dalam APBD Perubahan dengan SiLPA dalam APBD murni. Pendapatan Asli Daerah (PAD). Variabel pendapatan asli daerah (PAD) diukur dengan menghitung selisih antara PAD dalam APBD perubahan dengan PAD dalam APBD murni. Dana Perimbangan (DBH). Variabel dana perimbangan diukur dengan menggunakan selisih antara dana bagi hasil (DBH) dalam APBD-P dengan DBH dalam APBD murni.

Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dapat dituliskan seperti berikut:

$$PAB_{i,t} = \alpha_{i,t} + \beta_1 SPA_1 + \beta_2 PAD_2 + \beta_3 DBH_3 + \varepsilon_{i,t}$$

dengan  $\alpha_{i,t}$  adalah konstanta;  $\beta_1$  adalah koefisien regresi SiLPA;  $\beta_2$  adalah koefisien regresi PAD;  $\beta_3$  adalah koefisien regresi DBH; dan  $\varepsilon_{i,t}$  adalah *error terms*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Statistik deskriptif

No.	Nama Variabel	N	Minimum	Maksimum	Rata-Rata	Simpangan Baku
1.	Perubahan Sisa Anggaran (SPA)	70	0	220.755.627.297	29764472186,63	39240260672,350
2.	Perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	70	0	43920576144	6757061014,49	8412163721,306
3.	Perubahan Dana Perimbangan (DP)	70	-54416193600	507852358407	26160076742,66	87232217066,678
4.	Perubahan Anggaran Belanja (PAB)	70	-27410499211	407110610050	90733396031,87	84339074266,190

*Sumber: Data Penelitian (Diolah)*

Sebanyak 70 sampel yang disertakan dalam penelitian ini, diperoleh nilai rata-rata Perubahan Belanja Daerah sebesar Rp90733396031,87 atau sebesar Rp90,733 milyar, nilai standar deviasi lebih kecil daripada nilai rata-rata menunjukkan bahwa data variabel belanja daerah mengindikasikan hasil yang baik, hal tersebut dikarenakan nilai kesenjangan antara nilai maksimum dengan nilai minimum pada belanja daerah tinggi.

Nilai minimum belanja daerah sebesar Rp392.572.404.842, diperoleh Kabupaten Mukomuko pada tahun 2011 dan nilai belanja daerah yang tertinggi sebesar Rp3.490.591.534.327 diperoleh Kabupaten Bengkalis pada tahun 2011.

Sampel yang diikutsertakan pada penelitian ini sebanyak 70 sampel, diperoleh nilai rata-rata selisih sisa anggaran sebesar Rp2.976.4472.186,63, standar deviasi sebesar Rp39.240.260.672,350 menunjukkan nilai yang lebih besar dari nilai rata-rata yang mengindikasikan hasil yang kurang baik.

Nilai minimum perubahan sisa anggaran (SiLPA) sebesar Rp0,00

diperoleh Kota Purwakarta pada tahun 2010 dan Kabupaten Surabaya pada tahun 2012, dan nilai perubahan sisa anggaran (SiLPA) tertinggi sebesar Rp1.155.339.962.159 diperoleh Kabupaten Bengkalis pada tahun 2011.

Pada variabel pendapatan asli daerah (PAD), diperoleh nilai rata-rata pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp6.757.061.014, nilai standar deviasi lebih besar daripada nilai rata-rata yaitu sebesar Rp8.412.163.721,306 menunjukkan bahwa data variabel pendapatan asli daerah mengindikasikan hasil yang kurang baik, hal tersebut dikarenakan standar deviasi yang mencerminkan penyimpangan dari data variabel tersebut cukup tinggi karena lebih besar dari nilai rata-ratanya.

Nilai minimum perubahan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp0,00 diperoleh Kota Tanggamus pada tahun 2010 dan nilai perubahan pendapatan asli daerah (PAD) tertinggi sebesar Rp43.920.576.144 diperoleh Kabupaten Bandung pada tahun 2012.

Kemudian pada variabel dana perimbangan, diperoleh nilai rata-rata dana perimbangan sebesar Rp26.160.076.742,66, nilai standar deviasi lebih besar daripada nilai rata-rata yaitu sebesar Rp87.232.217.066,678 menunjukkan bahwa data variabel dana perimbangan mengindikasikan hasil yang kurang baik, hal tersebut dikarenakan standar deviasi yang mencerminkan penyimpangan dari data variabel tersebut cukup tinggi karena lebih besar dari nilai rata-ratanya.

Nilai minimum perubahan dana perimbangan sebesar Rp54.416.193.600 diperoleh Kabupaten Purwakarta pada

tahun 2010 dan nilai perubahan dana perimbangan tertinggi sebesar Rp2.357.186.182.407 diperoleh Kabupaten Bengkalis pada tahun 2010.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pengujian hipotesis yang menggunakan metode analisis regresi linear berganda (*multiple regression analysis*). Metode regresi linear berganda menghubungkan satu variabel dependen dengan beberapa variabel independen dalam suatu model penelitian. Hasil pengolahan data menghasilkan informasi dan persamaan regresi adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Persamaan Regresi Hasil Pengolahan Data

PAB = 38016494306,82 + 0,844SPA + 3,019PAD + 0,275DP + ε				
<i>t-value</i>	3,391	3,961	3,061	2,996
<i>Sig.</i>		0,000	0,003	0,004
<i>F-value/Sig.</i>	15,688/0,000			
<i>R/R<sup>2</sup>/Adjusted R<sup>2</sup></i>	0,645/0,416/0,390			

Sumber: Data Diolah (2014)

Tabel 2 menyajikan persamaan regresi yang merupakan hasil pengolahan data dengan menggunakan *software* SPSS. Dari persamaan regresi tersebut dapat diketahui bahwa konstanta ( $\alpha$ ) adalah sebesar 38.016.494.306,82, yang bermakna jika SPA, PAD, dan DBH dianggap konstan maka perubahan belanja daerah yang terjadi adalah sebesar 38.016.494.306,82.

Berdasarkan nilai *Sig.* sebesar 0,000 maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama maupun secara parsial, perubahan SPA, perubahan PAD, dan DBH berpengaruh terhadap PAB. Hal ini menggambarkan bahwa setiap perubahan nilai anggaran, baik itu bertambah ataupun berkurang pada sisa anggaran, pendapatan asli daerah, dan dana bagi hasil, akan mengakibatkan



berubahnya nilai alokasi belanja daerah dalam APBD-P.

Hasil regresi pada Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai  $R^2$  adalah sebesar 0,416 atau 41,6%. Hal ini menunjukkan bahwa 41,6% PAB dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen dalam penelitian ini yaitu SPA, PAD, dan DBH, sedangkan 58,4% sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pengujian hipotesis pertama, kedua dan ketiga yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa SPA, PAD, dan DBH berpengaruh signifikan terhadap perubahan alokasi belanja dalam penganggaran daerah dimana nilai signifikan yang diperoleh sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 atau 5%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap perubahan anggaran, baik itu bertambah ataupun berkurang pada sisa anggaran, pendapatan asli daerah, dan dana perimbangan, akan mengakibatkan berubahnya nilai alokasi belanja daerah dalam APBD-P.

### **Pengaruh Perubahan SiLPA terhadap Perubahan Belanja**

Besaran koefisien regresi SPA adalah sebesar 0,844, yang bermakna bahwa jika terjadi perubahan dalam

variabel SPA atau SiLPA sebesar 0,844 satuan maka akan menyebabkan terjadinya perubahan anggaran belanja daerah sebesar 1 satuan. Pengaruh SPA terhadap PAB ini penting (signifikan) sehingga tidak dapat diabaikan pada level keyakinan 95 persen, dengan nilai Sig. yang diperoleh adalah 0,000. Artinya, pada level signifikansi 5%, SiLPA berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja daerah.

Perubahan SiLPA (atau SPA) berpengaruh terhadap perubahan belanja. Dalam hal ini, sisa anggaran tahun sebelumnya direvisi dalam tahun anggaran berjalan, menyebabkan perubahan belanja. Perubahan SiLPA terjadi karena besaran yang diestimasi pada saat penyusunan anggaran tahun berjalan pada akhir tahun sebelumnya belum dapat memastikan besaran SiLPA sesungguhnya. Jumlah SiLPA yang pasti baru diketahui setelah hasil audit atas laporan keuangan pemerintah daerah diketahui.

Perubahan belanja yang disebabkan oleh sisa anggaran seperti yang diuji dalam penelitian ini, membuktikan bahwa sisa anggaran tahun sebelumnya penting untuk pembiayaan di tahun berjalan, sehingga harus dikelola dengan baik. Prediksi atas besaran SiLPA tahun berjalan yang akan dimasukkan ke dalam tahun anggaran berikutnya (pada saat

penyusunan APBD tahun berikutnya), harus dilakukan secara cermat. Pada kenyataannya, beberapa daerah sengaja mengecilkan estimasi SILPA agar pada tahun berikutnya dapat dilakukan penyesuaian dalam perubahan anggaran dengan tujuan tertentu.

### **Pengaruh Perubahan PAD terhadap Perubahan Belanja**

Besaran koefisien regresi PAD adalah sebesar 3,019, yang bermakna bahwa jika terjadi perubahan dalam variabel PAD sebesar 3,019 satuan, maka akan menyebabkan terjadinya PAB sebesar 1 satuan. Pengaruh PAD terhadap PAB ini penting (signifikan) sehingga tidak dapat diabaikan pada level keyakinan 95 persen, dengan nilai Sig. dan nilai t statistik yang diperoleh masing-masing adalah 0,003 dan 3,061. Artinya, pada level signifikansi 5%, perubahan dalam PAD berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja daerah.

Perubahan PAD yang menyebabkan terjadinya perubahan pada pos belanja juga sangat penting untuk diperhatikan. Perubahan PAD dapat terjadi karena beberapa sebab, diantaranya karena tidak terprediksinya sumber penerimaan baru pada saat penyusunan anggaran. Dalam hal ini bisa saja terjadi target PAD memang sengaja di *underestimate* (Abdullah, 2013) yang mana dapat

dinaikkan pada saat APBD-P dengan dasar tidak terprediksinya sumber penerimaan baru, dan kemudian dimasukkan ke dalam perubahan belanja.

Kebijakan penganggaran untuk PAD mengandung beberapa persoalan keagenan (*agency problems*), seperti adanya senjangan anggaran (*budget slack*) sebagai akibat adanya hasrat pada diri pengusul dan pelaksana anggaran untuk mencapai target secara lebih baik dengan lebih mudah (Halim & Abdullah, 2010). Artinya, kinerja yang baik ditunjukkan dari pencapaian realisasi PAD yang melampaui target PAD. Oleh karena itu, eksekutif selaku perencana, pengusul, pelaksana, dan juga penanggungjawab PAD cenderung mengusulkan target PAD yang jauh di bawah potensi PAD yang sesungguhnya (Abdullah & Nazry, 2014).

### **Pengaruh Perubahan Dana Perimbangan terhadap Perubahan Belanja**

Besaran koefisien regresi DBH adalah sebesar 0,275, yang bermakna bahwa jika terjadi perubahan dalam variabel DBH sebesar 0,275 satuan, maka akan menyebabkan terjadinya PAB sebesar 1 satuan. Pengaruh DBH terhadap PAB ini penting (signifikan) sehingga tidak dapat diabaikan pada level keyakinan 95 persen, dengan nilai Sig.

yang diperoleh adalah 0,004. Artinya, pada level signifikansi 5%, perubahan dalam dana perimbangan berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja daerah.

Perubahan dana perimbangan yang berpengaruh signifikan terhadap perubahan belanja dalam APBD-P terutama terjadi pada DBH. DBH selalu mengalami revisi dalam APBD-P daerah kabupaten/kota karena adanya penyesuaian transfer dari Pemerintah Pusat. Perubahan penerimaan yang berasal dari penyesuaian (biasanya berupa tambahan) ini dapat digunakan untuk belanja apa saja, kecuali disebutkan perubahan DBH tersebut harus dialokasikan untuk belanja tertentu. Hasil ini berbeda dengan temuan penelitian Marzalita, et al. (2014) yang menyatakan bahwa perubahan DBH tidak berpengaruh terhadap perubahan belanja barang dan jasa.

Fleksibilitas dalam penggunaan perubahan (tambahan) DBH mengandung risiko berupa ketidaktepatan dalam pengalokasian dana tersebut dalam anggaran belanja. Oleh karena perubahan DBH sering terjadi di semester pertama tahun berjalan, maka proses pengalokasian di dalam APBD tidak terlalu berisiko karena masih dapat dibahas oleh kepala daerah dan DPRD

dalam perubahan anggaran tahun berjalan. Biasanya pemerintah daerah menggunakan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) sebagai dasar untuk menggunakan tambahan dana tersebut, sebelum dilakukan perubahan dalam KUA (Kebijakan Umum APBD) dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara).

## KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan anggaran belanja daerah (PAB) dipengaruhi oleh sisa anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), pendapatan asli daerah (PAD), dan dana perimbangan (DP). Hasil ini memiliki implikasi pada keharusan pemerintah daerah untuk berhati-hati dalam melakukan perubahan anggaran karena tidak semua perubahan harus berupa peningkatan anggaran belanja untuk semua jenis belanja.

Disarankan untuk perumusan kebijakan anggaran di pemerintah daerah, perlu dilakukan kajian tentang perilaku perubahan belanja yang dikaitkan dengan kualitas anggaran belanja yang diajukan dalam anggaran murni (APBD awal). Perilaku *moral hazard*, terutama di SKPD perlu dikaji lebih lanjut, khususnya terkait motivasi dalam membuat anggaran belanja yang digelembungkan (*mark-up*). Kajian lebih lanjut juga dibutuhkan untuk

mengetahui ketidaktepatan dalam penggunaan jenis-jenis pendapatan ke dalam belanja-belanja tertentu. Kebijakan *earmark* atau labeling diperlukan untuk tujuan tertentu agar tidak menyalahi filosofi pengelolaan keuangan daerah yang sejatinya merupakan alat untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk menuju visi masyarakat yang sejahtera.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah (1) menggunakan data yang relatif sedikit, sehingga memiliki kelemahan dalam generalisasi hasil penelitian; (2) menggunakan data sekunder yang tidak sepenuhnya dapat menangkap fenomena perilaku oportunistis dalam penganggaran untuk perubahan anggaran; dan (3) cenderung hanya menggunakan data Pemda yang memiliki transparansi relatif bagus, karena menyajikan informasi APBD dan perubahan APBDnya secara online, setidaknya bisa diperoleh dengan mesin pencari Google.com.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, S. 2011. *Penilaian Kinerja Keuangan Daerah*. Web: <<http://syukriy.wordpress.com/2011/11/29/penilaian-kinerja-keuangan-daerah/>> [10/10/13].

\_\_\_\_\_. 2012. *Perilaku Opportunistik Legislatif dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. Disertasi. Tidak Dipublikasikan. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.

\_\_\_\_\_. 2013a. *Defisit/Surplus dan SILPA dalam Anggaran Daerah: Apakah Saling Berhubungan*. Web: <<https://syukriy.wordpress.com/2013/01/01/defisit-dan-surplus-dalam-anggaran-daerah-apaakah-saling-berhubungan/>> [29/11/21].

\_\_\_\_\_. 2013b. *Perubahan APBD*. Melalui <<https://syukriy.wordpress.com/2013/04/22/perubahan-apbd/>> [29/11/21].

\_\_\_\_\_. 2013c. *Proses Penyusunan Anggaran Daerah: Masalah Keagenan yang Tidak Tuntas*. Web: <<http://syukriy.wordpress.com/>> [20/13/13].

\_\_\_\_\_. 2013d. *Pengaruh SiLPA Terhadap Belanja*. Web: <[syukriy.wordpress.com/2013/12/16/pengaruh-silpa-terhadap-belanja/](http://syukriy.wordpress.com/2013/12/16/pengaruh-silpa-terhadap-belanja/)>.

\_\_\_\_\_. & Abdul Halim. 2006. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah daerah: (Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi). *Jurnal Akuntansi Pemerintah* 2(1): 53-64. Web: [https://www.researchgate.net/publication/255967655\\_Hubungan\\_Dan\\_Masalah\\_Keagenan\\_Di\\_Pemerintahan\\_Daerah\\_Sebuah\\_Peluang\\_Penelitian\\_Anggaran\\_Dan\\_Akuntansi](https://www.researchgate.net/publication/255967655_Hubungan_Dan_Masalah_Keagenan_Di_Pemerintahan_Daerah_Sebuah_Peluang_Penelitian_Anggaran_Dan_Akuntansi)

\_\_\_\_\_. & Afrah Junita. 2020. Determinan Kinerja Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi* 13(1): 109-124.

\_\_\_\_\_, Mirza Khairul Reza, Afrah Junita, & Tuti Meutia. 2020. Parliament Oversight on Local Government Financial Management: An Empirical Evidence. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 5(3): 296-312.

\_\_\_\_\_. & Neza Muthia. 2017. Determinan Saldo Kas Akhir Tahun pada Pemerintah Daerah di Aceh. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia* 21(2): 130-140. Web:

- <https://journal.uii.ac.id/JAAI/article/view/8613>. DOI: <https://doi.org/10.20885/jaa.vol21.iss2.art5>.
- \_\_\_\_\_ & Ramadhaniatun Nazry. 2014. Analisis Varian Anggaran Pemerintah Daerah: Penjelasan Empiris dari Perspektif Keagenan. *Makalah* disajikan pada Konferensi Ilmiah Akuntansi (KIA) I, yang diselenggarakan oleh IAI KPAD Wilayah DKI Jakarta & Banten, di Universitas Mercu Buana, Jakarta, 27 Februari 2014.
- Abidin, Handa S. 2012. Definisi Belanja Daerah. Web: <http://penelutihukum.org/tag/definisi-belanja-daerah/> [11/10/13].
- Adi, Priyo Hari. 2018. Rent-Seeking Behaviour in Local Government Budget in Indonesia. *Dissertation*. Melbourne: Victoria Graduate School of Business, College of Business, Victoria University.
- Amran, A., D. Darwanis, & Syukriy Abdullah. 2015. Pengaruh Perubahan Pendapatan Asli Daerah, Perubahan Dana Bagi Hasil, dan Perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Perubahan Belanja Bantuan Sosial: Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* 4(1): 1-10.
- Asmara, J.A. 2010. Analisis Perubahan Alokasi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi* 3 (2): 155-172.
- Cornia, G.C., R.D. Nelson, & A. Wilko. 2004. Fiscal Planning, Budgeting, and Rebudgeting Using Revenue Semaphores. *Public Administration Review* 64 (2):164-179. DOI: 10.1111/j.1540-6210.2004.00358.x.
- Cuadrado-Ballesteros, Beatriz & Isabel-Maria Garcia-Sanchez. 2018. Conditional Factors of Political Budget Cycles: Economic Development, Media Pressure, and Political Fragmentation. *Public Performance & Management Review* 41(4): 835–858. <https://doi.org/10.1080/15309576.2018.1465829>.
- Forrester, J.P. and D.R. Mullins. 1992. Rebudgeting: The Serial Nature of Municipal Budgetary Processes. *Public Administration Review* 52 (2): 467-473. DOI: 10.2307/976806.
- Hadinata, Fristian. 2013. Analisis Hubungan Surplus/Defisit dengan SILPA pada Pemerintah Daerah di Indonesia. *Skripsi*. Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh.
- Halim, Abdul & Syukriy Abdullah. 2010. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* 2(1): 53-64.
- Isaksen, Jan. 2005. The Budget Process and Corruption. *Working paper U4 Issue 3:2005*. [www.U4.no](http://www.U4.no).
- Junita, Afrah. 2015. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Anggaran pada Pemerintahan Daerah. *Jurnal Manajemen dan Keuangan* 4(2): 366-375.
- Junita, Afrah & Syukriy Abdullah. 2016. Pengaruh Fiscal Stress dan Legislature Size terhadap Expenditure Change pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi* 20(3): 477-478.
- Junita, Afrah, E. Erlina, & Syukriy Abdullah. 2018. The Effect of Budget Variances on the Local Government Budget Changes with Legislature Size as moderator. *Academic Journal of Economic Studies*, 162-173
- Kurniawan, Arief & Fefri Indra Arza. 2019. Pengaruh *Fiscal Stress*, Varians Anggaran dan Perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Perubahan Anggaran Belanja pada Pemerintah Daerah:

- Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 1(3): 1275-1292.
- Lee, R.D. & R.W. Johnson Jr. 2012. *Public Budgeting Systems*. Gaithersburg, Maryland: An Aspen Publication, Inc.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Marzalita, M., N. Nadirsyah, & Syukriy Abdullah. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Anggaran Belanja Barang dan Jasa pada Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* 3(3): 46-58.
- Nawawi, Ahmad. 2021. Analisis Respon Belanja APBD terhadap Transfer Tidak Bersyarat dari Pemerintah Pusat: Studi Kasus Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2020. *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia* 3(1): 39-55.
- Nellyanti, N., D. Darwanis, & Syukriy Abdullah. 2016. Pengaruh Perubahan Anggaran Pendapatan Asli Daerah, Perubahan Anggaran Dana Bagi Hasil, dan Perubahan Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung: Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* 5(2): 68-78.
- Pessina, Eugenio-Anessi. 2012. *Rebudgeting in Italian Municipalities: Magnitude and Drivers*. Working Paper.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodelogi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sjahir, Bambang Suharnoko, Krisztina Kis-Katos & Günther G. Schulze. 2013. Political Budget Cycles in Local Indonesia. *Occasional Paper No. 17*. University of Freiburg.
- Tuasikal, Askam. 2008. Pengaruh DAU, DAK, PAD, dan PDRB terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi Universitas Pattimura* 1(2): 142-155.
- Wildavsky, Aaron, 1988. *The New Politics of the Budgetary Process*. Glenview, IL: Scott, Foresman and Company.

## PEDOMAN PENULISAN NASKAH ILMIAH

Jurnal Ekonomi dan Pembangunan (JEP) difokuskan pada penelitian empiris atau artikel konseptual dalam bidang ilmu ekonomi yang mencakup perencanaan pembangunan, ekonomi daerah, ekonomi publik, ekonomi industri, ekonomi kelembagaan, ekonomi internasional, ekonomi islam, keuangan dan perbankan. Naskah yang akan diterbitkan dalam Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Bappeda Aceh, harus memenuhi ketentuan berikut:

### **Bentuk Naskah**

1. Naskah berupa karya asli yang belum pernah dipublikasikan di tempat lain dan tidak sedang diajukan ke tempat lain
2. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sesuai dengan kaidah masing-masing bahasa yang digunakan.

### **Komponen Naskah**

Komponen utama naskah wajib mencantumkan dan memuat hal-hal berikut:

- a. **Judul**, dalam bahasa Indonesia disertai dengan terjemahannya dalam bahasa Inggris, ditulis dengan jelas menggambarkan isi tulisan.
- b. **Identitas Penulis**, dimuat di bawah judul tulisan, memuat nama, alamat korespondensi dan *e-mail*.
- c. **Abstract**, ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris beserta kata kunci sebanyak 3-5. Abstrak ditulis dalam 1 alinea berisi latar belakang masalah, tujuan penelitian, hasil, dan rekomendasi. Panjang abstrak dibatasi 200-400 kata.
- d. **Pendahuluan**, (tanpa sub judul, memuat latar belakang, masalah, rumusan masalah, rangkuman kajian teoretik, ulasan ilmiah terkait judul berdasarkan rujukan (pustaka) terkini, dan tujuan penelitian). Dalam pendahuluan ini juga disajikan pertanyaan ilmiah yang akan dijawab dalam penelitian tersebut.
- e. **Metode**, berisikan desain penelitian (ditulis dengan jelas waktu, lokasi, bahan, dan analisis data penelitian sehingga memungkinkan peneliti lain untuk mengulangi percobaan yang terkait). Bagian metode ditulis tanpa subjudul.
- f. **Hasil dan Pembahasan**, (sajikan hasil terlebih dahulu kemudian diikuti dengan penjelasan atau pembahasan. Pembahasan harus menggunakan rujukan (pustaka) atau dibandingkan (diulas) dengan rujukan terkini). Bagian hasil dan pembahasan ditulis tanpa subjudul.
- g. **Kesimpulan**, (ditulis dalam bentuk essay (paragraph) secara ringkas dan jelas dan harus bisa menjawab (menjelaskan) judul, tujuan, dan hasil penelitian) serta disusun juga rekomendasinya.
- h. **Daftar Pustaka**, menuliskan sesuai dengan acuan model *Harvard-APA Style*, berurutan sesuai abjad.
- i. **Ucapan Terima Kasih**, jika ada, merupakan wujud penghargaan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian atau penulisan naskah.

## Tabel dan Gambar

Tabel, gambar dan grafik diharapkan dapat terbaca dengan jelas dan mudah dipahami, serta diberi penjelasan yang lebih mendalam. Judul tabel diletakkan di atas tabel dan judul gambar di bawah gambar. Tabel atau gambar yang diacu dari sumber lain harus disebutkan, kecuali merupakan hasil penelitian penulisnya sendiri.

## Contoh Penulisan Daftar Pustaka

### a. Buku teks

Aturan penulisan: nama belakang, singkatan (inisial) nama depan dan nama tengah (jika ada), tahun penerbitan, *judul buku* (cetak miring), edisi buku, nama penerbit, kota penerbit.

Contoh:

Merna T. dan F. F. Al-Thani. 2008. *Corporate Risk Management*. 2nd ed. John Welly and Sons Ltd. England.

Wiley, J. 2006. *Contemporary Financial Management*. 3rd ed. Mc. GrowHill. Los Angeles.

### b. Buku Teks Terjemahan

Aturan penulisan: nama belakang penulis asli, singkatan (inisial) nama depan dan nama tengah (jika ada), tahun penerbitan, *judul buku asli* (cetak miring), edisi/cetakan, nama penerbit, kota penerbit, nama penerjemah, tahun, *judul buku* (cetak miring), edisi/cetakan, nama penerbit, kota penerbit.

Contoh:

Cresswell, J.W. 2008. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Third Edition. Sage Publication. California. Terjemahan A. Fawaid. 2010. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Cetakan 1. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Kieso, D.E., J.J. Weygandt, dan T.D. Warfield. 2007. *Intermediate Accounting*. Twelfth Edition. John Wiley & Sons, Inc. USA. Terjemahan E. Salim. 2008. *Akuntansi Intermediate*. Edisi Keduabelas. Jilid 2. Erlangga. Jakarta.

### c. Buku Terbitan Lembaga/Badan/Organisasi

Aturan penulisan: nama lembaga/badan/organisasi, tahun penerbitan, *judul buku* (cetak miring), edisi/cetakan, nama penerbit, kota penerbit.

Contoh:

Badan Pusat Statistik. 2013. *Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi*. Januari. BPS Aceh. Banda Aceh

Komisi Pemberantasan Korupsi. 2009. *Laporan Tahunan 2009: Perjuangan Melawan Korupsi Tak Pernah Berhenti*. KPK. Jakarta.

### d. Buku Terbitan Lembaga/Badan/Organisasi (Berisi Himpunan Peraturan, UU, dan sejenisnya)

Aturan penulisan: nama lembaga/badan/organisasi, tahun penerbitan, *judul peraturan/UU yang dirujuk* (cetak miring), nomor atau seri peraturan/UU, edisi/cetakan, nama penerbit, kota penerbit.

Contoh:



Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2011. *Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan*. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 58 (Revisi 2009). DSAK-IAI. Jakarta.

**e. Peraturan, Undang-Undang, dan sejenisnya (cetak lepas, tidak berupa buku himpunan)**

Aturan penulisan: nomor dan tahun peraturan/UU, *judul peraturan/UU yang dirujuk* (cetak miring), tanggal pengesahan/penerbitan (jika ada), nomor lembaran negara (jika ada), organisasi penerbit (jika ada), kota tempat pengesahan/penerbitan.

Contoh:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 *Sistem Pendidikan Nasional*. 8 Juli 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 *Standar Nasional Pendidikan*. 16 Mei 2005. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41. Jakarta.

**f. Artikel dalam Jurnal.**

Aturan penulisan: nama belakang, singkatan (inisial) nama depan dan nama tengah (jika ada), tahun penerbitan, judul artikel, *nama jurnal* (cetak miring), volume dan nomor jurnal (nomor jurnal dalam tanda kurung), nomor halaman artikel dalam jurnal.

Contoh:

Riduwan, A. 2010. Etika dan Perilaku Koruptif dalam Praktik Manajemen Laba. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia* 14(2): 121-141.

Veronica, S. dan Y. S. Bachtiar. 2005. The Role of Governance in Preventing Misstated Financial Statement. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 2(1): 159-173.

**g. Artikel Seminar/Simposium (dalam Prosiding)**

Aturan penulisan: nama belakang, singkatan (inisial) nama depan dan nama tengah (jika ada), tahun penerbitan, *nama prosiding* (cetak miring), nomor dan volume prosiding (jika ada), tanggal seminar/simposium, *penerbit prosiding* (jika ada, cetak miring), nomor halaman artikel dalam prosiding.

Contoh:

Fidiana, I. Triyuwono, dan A. Riduwan. 2012. Zakah Perspectives as a Symbol of Individual and Social Piety: Developing Review of the Meadian Symbolic Interactionism. *Global Conference on Business and Finance Proceedings* 7(1). January 3-6. *The Institute of Business and Finance Research*: 721-742

**h. Artikel Seminar/Simposium (cetak lepas)**

Aturan penulisan: nama belakang, singkatan (inisial) nama depan dan nama tengah (jika ada), tahun penerbitan, *nama seminar/simposium* (cetak miring), tanggal seminar/simposium, nomor halaman artikel.

Contoh:

Kalana, I., S. Ngumar, dan I.B. Riharjo. 2012. Independensi Auditor Berbasis Kultur dan Filsafat Herbert Blumer. *Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin*. 20-23 September: 1-25.

Riduwan, A. 2012. Realitas dalam Cermin Retak: Laba Akuntansi dalam Bingkai Penafsiran Praktisi Bisnis Non-Akuntan (Studi Hermeneutika-Kritis). *Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin*. 20-23 September: 1-22.

#### **i. Artikel dalam Buku Antologi dengan Editor**

Aturan penulisan: nama belakang, singkatan (inisial) nama depan dan nama tengah (jika ada), tahun penerbitan, judul artikel, *judul buku* (cetak miring), nama editor buku, penerbit, kota penerbit.

Contoh:

Azra, A. 2005. Pluralisme Islam Dalam Perspektif Historis. Dalam *Nilai-Nilai Pluralisme Islam: Bingkai Gagasan Yang Berserak*. Editor M. Sururin. Cetakan 1. Penerbit Nuansa. Bandung.

Barth, M.E. 2004. Fair Values and Financial Statement Volatility. Dalam *The Market Discipline Across Countries and Industries*. Editor C. Borio, W.C. Hunter, G.G. Kaufman, dan K. Tsatsaronis. MIT Press. Cambridge.

#### **j. Skripsi/Tesis/Disertasi**

Aturan penulisan: nama belakang, singkatan (inisial) nama depan dan nama tengah (jika ada), tahun, judul skripsi/tesis/disertasi, *skripsi/tesis/disertasi* (cetak miring), nama program studi dan/atau perguruan tinggi, kota tempat perguruan tinggi.

Contoh:

Natsir, M. 2008. Studi Efektivitas Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia Melalui Jalur Suku Bunga, Jalur Nilai Tukar, dan Jalur Ekspektasi Inflasi Periode 1990:2-2007:1. *Disertasi*. Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Surabaya.

#### **k. Artikel dari Internet**

Aturan penulisan: nama belakang, singkatan (inisial) nama depan dan nama tengah (jika ada), tahun, judul, *alamat e-mail* (cetak miring), tanggal dan jam unduh.

Contoh:

Yahya, H. 2005. Realitas dan Pancaindra Anda. <http://www.pesanharunyahya.com> dan [info@harunyahya.com](mailto:info@harunyahya.com). 27 Januari 2008 (14:35).

#### **l. Makalah Pidato Ilmiah dan semacamnya**

Aturan penulisan: nama belakang, singkatan (inisial) nama depan dan nama tengah (jika ada), tahun, judul, *sifat/tujuan makalah* (cetak miring), nama kegiatan, tanggal kegiatan, kota tempat kegiatan.

Contoh:

Raka, G. 2003. Menggarisbawahi Peran Idealisme, Karakter dan Komunitas dalam Transformasi Institusi. *Makalah Orasi Ilmiah*. Sidang Terbuka Senat Peringatan Dies Natalis ke-44 Institut Teknologi Bandung. 2 Maret. Bandung.

#### **m. Artikel dari Majalah atau Surat Kabar**

Aturan penulisan: nama belakang, singkatan (inisial) nama depan dan nama tengah (jika ada), tahun, *judul artikel* (cetak miring), nama majalah/surat kabar, tanggal, halaman, kota penerbit.

Contoh:

Mangunwijaya, Y.B. 1992. *Pendidikan Manusia Merdeka*. Harian Kompas. 11 Agustus. Halaman 15. Jakarta.

#### **n. Berita dari Majalah atau Surat Kabar**

Aturan penulisan: nama majalah/surat kabar, tahun, *judul berita* (cetak miring), nomor dan/atau volume (jika ada), tanggal, halaman, kota penerbit.

Contoh:

Majalah Tempo. 2002. *Jatuhnya Enron*. No. XXXVIII. 23 Januari. Halaman 18. Jakarta

#### **Penulisan**

Naskah dituliskan dengan menggunakan Times New Roman 12, maksimal 20 halaman A4 spasi ganda, ditulis dengan program komputer Microsoft Word.

#### **Prosedur Naskah**

Naskah yang masuk hendaknya diterima 2 (dua) bulan sebelum waktu penerbitan untuk di-*review* oleh anggota dewan redaksi dan reviewer (mitra bestari) yang ditunjuk oleh Dewan Redaksi. Dewan redaksi berhak menolak naskah ilmiah yang dianggap tidak layak muat di Jurnal Ekonomi dan Pembangunan. Naskah dikirimkan melalui *Open Journal System* (OJS) <https://ojsbappeda.acehprov.go.id/ojs2/index.php/a/index>.

[timlitbang@gmail.com](mailto:timlitbang@gmail.com)

atau melalui pos ke:

**Dewan Redaksi Jurnal Ekonomi dan Pembangunan**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Aceh**  
**Bidang Penelitian dan Pengembangan**  
**Jl. Tgk. H. Mohd. Daud Beureu-eh No. 26**

Redaksi berhak menolak naskah yang isi dan formatnya tidak sesuai dengan pedoman penulisan naskah di atas dan redaksi tidak berkewajiban untuk mengembalikan naskah tersebut. Setiap penerimaan atau penolakan naskah akan disertai dengan surat resmi yang ditandatangani oleh Dewan Redaksi dan dikirimkan kepada penulis. Setiap penulis yang karya tulisnya telah diterbitkan, akan mendapat satu buah cetak lepas dan satu buah *full print*

**Hak Cipta**

Setiap penulis menyetujui untuk mengalihkan hak ciptanya ke Jurnal Ekonomi dan Pembangunan jika naskahnya diterima untuk diterbitkan.